

2012-2016

**PRODUK
DOMESTIK
REGIONAL
BRUTO**

Menurut Lapangan Usaha

KOTA JAKARTA BARAT



<http://jakbarkota.bps.go.id>

2012-2016

**PRODUK
DOMESTIK
REGIONAL
BRUTO**

Menurut Lapangan Usaha

KOTA JAKARTA BARAT

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT LAPANGAN USAHA
KOTA JAKARTA BARAT
2012-2016**

ISSN : 1829-7153
Nomor Publikasi : 31740.1702
Nomor Katalog BPS : 9302006.3174
Ukuran Buku : 15 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : xiv + 96 halaman

Penanggung Jawab:

Kepala BPS Kota Administrasi Jakarta Barat

Naskah:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Editor:

1. Muhammad Noval, SST
2. Ayesha Tantriana, SST

Gambar Kulit:

BPS Kota Administrasi Jakarta Barat

Diterbitkan oleh:

© BPS Kota Administrasi Jakarta Barat

"Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik"

KATA PENGANTAR

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Jakarta Barat secara tahunan rutin diterbitkan oleh BPS Kota Administrasi Jakarta Barat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (kabupaten/kota) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Jakarta Barat tahun 2012 - 2016 secara deskriptif. Selain itu, publikasi ini juga menampilkan tabel-tabel PDRB tahun 2012—2016 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 dalam bentuk nilai nominal maupun persentase. Sama dengan tahun-tahun sebelumnya, PDRB yang disajikan dalam publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010 dan pembagian lapangan usaha mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009.

Akhirnya kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penerbitan ini terlaksana. Saran perbaikan selalu diharapkan untuk penyempurnaan penerbitan selanjutnya. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Jakarta, 10 Agustus 2017

**BPS KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT**
Kepala,



Ir Banua Rambe M.Si

<http://jakbarkota.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PENJELASAN TEKNIS	xii
I. PENJELASAN UMUM	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto	1
1.2. Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto	2
1.3. Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto	3
II. RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN	9
2.1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9
2.2. Pertambangan dan Penggalian	15
2.3. Industri Pengolahan	18
2.4. Pengadaan Listrik dan Gas	25
2.5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	28
2.6. Konstruksi	29
2.7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	31
2.8. Transportasi dan Pergudangan	33
2.9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	37
2.10. Informasi dan Komunikasi	39
2.11. Jasa Keuangan dan Asuransi	41

	Halaman
2.12. Real Estat	50
2.13. Jasa Perusahaan	51
2.14. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	53
2.15. Jasa Pendidikan	54
2.16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	54
2.17. Jasa Lainnya	55
III. TINJAUAN EKONOMI JAKARTA BARAT	59
3.1. Struktur Ekonomi	60
3.2. Pertumbuhan Ekonomi	62
3.3. PDRB Perkapita	64
IV. PERKEMBANGAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA	65
4.1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	65
4.3. Industri Pengolahan	66
4.3. Pengadaan Listrik dan Gas	67
4.4. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	69
4.5. Konstruksi	70
4.6. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	71
4.7. Transportasi dan Pergudangan	72
4.8. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	73
4.9. Informasi dan Komunikasi	74
4.10. Jasa Keuangan dan Asuransi	76
4.11. Real Estat	77
4.12. Jasa Perusahaan	77

	Halaman
4.13. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	78
4.14. Jasa Pendidikan	80
4.15. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	81
4.16. Jasa Lainnya	82

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1.	Distribusi Persentase Beberapa Lapangan Usaha, 2015-2016 61
Grafik 3.2.	Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha, Tahun 2015-2016 63
Grafik 4.1.	Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Persen), 2012-2016 66
Grafik 4.2.	Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (Persen), 2012-2016 67
Grafik 4.3.	Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Pengadaan Listrik dan Gas (Persen), 2012-2016 68
Grafik 4.4.	Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang (Persen), 2012-2016 69
Grafik 4.5.	Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Konstruksi (Persen), 2012-2016 70
Grafik 4.6.	Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Persen), 2012-2016 71
Grafik 4.7.	Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Transportasi dan Pergudangan (Persen), 2012-2016 73
Grafik 4.8.	Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Persen), 2012-2016 74
Grafik 4.9.	Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Informasi dan Komunikasi (Persen), 2012-2016 75
Grafik 4.10.	Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Jasa Keuangan dan Asuransi (Persen), 2012-2016 76
Grafik 4.11.	Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Real Estat (Persen), 2012-2016 77

Grafik 4.12.	Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Jasa Perusahaan (Persen), 2012-2016	78
Grafik 4.13.	Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (Persen), 2012-2016	79
Grafik 4.14.	Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Jasa Pendidikan (Persen), 2012-2016	80
Grafik 4.15.	Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Persen), 2012-2016	81
Grafik 4.16.	Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Jasa Lainnya (Persen), 2012-2016	82

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB	6
Tabel 3.1. Perbandingan PDRB DKI Jakarta dan PDRB Jakarta Barat 2012-2016 (Milyar Rupiah)	59
Tabel 3.2. PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2012-2016	64

<http://jakbarkota.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Tabel 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Jakarta Barat (Miliar Rupiah), 2012-2016	85
Tabel 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Jakarta Barat (Miliar Rupiah), 2012-2016	86
Tabel 3	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Jakarta Barat (Persen), 2012-2016	87
Tabel 4	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Jakarta Barat (Persen), 2012-2016	88
Tabel 5	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Jakarta Barat (Persen), 2013-2016	89
Tabel 6	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Jakarta Barat (Persen), 2013-2016	90
Tabel 7	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Jakarta Barat, 2013-2016	91
Tabel 8	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Jakarta Barat, 2013-2016	92
Tabel 9	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (2010=100) Kota Jakarta Barat, 2012-2016	93
Tabel 10	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Jakarta Barat, 2013-2016 (Persen)	94

PENJELASAN TEKNIS

1. Penghitungan statistik neraca nasional yang digunakan telah mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa yang dikenal sebagai “Sistem Neraca Nasional”. Namun, penerapan statistik neraca nasional tersebut telah disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi Indonesia.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (kabupaten/kota) menggambarkan kemampuan kabupaten/kota untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.
3. Penyajian PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

-
4. PDRB maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam publikasi disini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.
 5. Tahun Dasar adalah tahun terpilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar penghitungan tahun-tahun yang lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri data dengan indikator rinci mengenai perubahan/pergerakan yang terjadi.
 6. Harga Berlaku adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan.
 7. Harga Konstan adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar.
 8. Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari penghitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

<http://jakbarkota.bps.go.id>

BAB I. PENJELASAN UMUM

1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya dibidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Apa yang dimaksud dengan PDRB?

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

1.2. Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto

Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha ekonomi dalam suatu wilayah. Lapangan usaha ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

-
5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu provinsi.

1.3. Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan PDRB Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

Apa yang dimaksud SNA 2008?

SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur item tertentu seperti PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain :

- Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas data PDRB;
- Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

- Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan *saving*, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan

tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

- Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks harga produsen (*Producers Price Index /PPI*);
- Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya dan 44 diantaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDRB tahun dasar 2010 diantaranya:

- Konsep dan Cakupan: Perlakuan *Work-in Progress* (WIP) pada *Cultivated Biological Resources* (CBR);
- Merupakan penyertaan pertumbuhan aset alam hasil budidaya manusia yang belum dipanen sebagai bagian dari output lapangan usaha yang bersangkutan seperti: nilai tegakan padi yang belum dipanen, nilai sapi perah yang belum menghasilkan, nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen;
- Metodologi: Perbaikan metode penghitungan output bank dari *Imputed Bank Services Charge* (IBSC) menjadi *Financial Intermediation Services Indirectly Measured* (FISIM);

- Valuasi: Nilai tambah lapangan usaha dinilai dengan Harga Dasar (*Basic Price*). Merupakan harga keekonomian barang dan jasa ditingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk. Valuasi ini hanya untuk penghitungan PDB, sedangkan PDRB menggunakan harga produsen;
- Klasifikasi: Klasifikasi yang digunakan berdasarkan *Internasional Standard Classification* (ISIC rev.4) dan *Central Product Classification* (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009 (KBLI 2009) dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia 2010 (KBKI 2010).

Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode dari SNA sebelumnya dan SNA 2008 untuk PDRB menurut lapangan usaha antara lain dijelaskan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Penghitungan PDRB

Variabel	Konsep Lama	Konsep Baru
1. Output pertanian	Hanya mencakup output pada saat panen	Output pada saat panen ditambah nilai hewan dan tumbuhan yang belum menghasilkan
2. Metode penghitungan output bank komersial	Menggunakan metode <i>Imputed Bank Services Charge</i> (IBSC)	Menggunakan metode <i>Financial intermediary Services Indirectly Measured</i> (FISIM)
3. Valuasi	Harga Produsen	Harga Dasar
4. Biaya eksplorasi mineral dan pembuatan produk original	Dicatat sebagai konsumsi antara	Dicatat sebagai output dan dikapitalisasi sebagai PMTB

Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun Dasar 2000 ke PDRB Tahun Dasar 2010

Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI 2009.

<http://jakbarkota.bps.go.id>

<http://jakbarkota.bps.go.id>

BAB II. RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN

Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing lapangan usaha dan sub lapangan usaha, cara-cara perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, serta sumber datanya.

2.1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Lapangan usaha ini mencakup segala pengusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

Golongan pokok ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual.

a. Tanaman Pangan

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dan lain-lain), serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dan lain-lain). Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup lapangan usaha pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud

pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.

Data produksi padi dan palawija diperoleh dari Subdit Statistik Tanaman Pangan, BPS, atau Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan-BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen-BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman pangan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan-BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman pangan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Tanaman Pangan-BPS.

b. Tanaman Hortikultura

Sub lapangan usaha tanaman hortikultura terdiri dari tanaman hortikultura semusim dan tanaman hortikultura tahunan. Tanaman hortikultura semusim meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali penanaman. Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman hortikultura meliputi kelompok komoditi sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias.

Data produksi komoditas hortikultura diperoleh dari Subdit Statistik Hortikultura-BPS, atau Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan-BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen-BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman hortikultura dari Subdit Statistik Harga Perdesaan-BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman hortikultura diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

c. Tanaman Perkebunan

Sub lapangan usaha tanaman perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Data produksi komoditas perkebunan diperoleh dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, atau Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan-BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen-BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman perkebunan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan-BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman perkebunan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

d. Peternakan

Sub lapangan usaha peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Sub lapangan usaha ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dan sebagainya.

Data produksi komoditas peternakan diperoleh dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, atau Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan-BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen-BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok peternakan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan-BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan peternakan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Peternakan (Ternak Besar dan Kecil, Ternak Unggas, dan Sapi Perah) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Peternakan-BPS.

e. Jasa Pertanian dan Perburuan

Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar. Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan). Dicakup juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian/hewan bersama operatornya dan risiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa.

Kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar mencakup usaha perburuan dan penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari furskin, reptil, dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk perburuan dan penangkapan binatang dengan perangkap untuk umum, penangkapan binatang (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan, produksi kulit bulu binatang, reptil atau kulit burung dari kegiatan perburuan atau penangkapan.

Sedangkan kegiatan penangkaran satwa liar mencakup usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk pelestarian satwa liar, baik satwa liar darat dan satwa liar laut seperti mamalia laut, misalnya duyung, singa laut dan anjing laut.

Output jasa pertanian diperoleh dengan pendekatan imputasi dengan memperhatikan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan pertanian pada periode tertentu. Output kegiatan pertanian diperoleh dari Subdit Neraca Barang-BPS. Sedangkan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output diperoleh dari hasil Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani, dan Survei Perusahaan Peternakan yang dilakukan oleh BPS.

Sedangkan untuk kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar diestimasi menggunakan pendapatan devisa dari penjualan satwa liar yang datanya diperoleh dari Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Kehutanan dan Penebangan Kayu

Sub lapangan usaha ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk disini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Data produksi kayu bulat dan hasil hutan lainnya berasal dari Perum Perhutani, Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Subdit Statistik Kehutanan-BPS., atau Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta. Data harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Kehutanan-BPS.

Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen-BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan kehutanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Kehutanan (Hak Pengusahaan Hutan dan Pembudidaya Tanaman Kehutanan) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Kehutanan-BPS.

3. Perikanan

Sub lapangan usaha ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, keramba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicapuk juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Data produksi komoditas perikanan diperoleh dari Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya-Kementerian Kelautan dan Perikanan, atau Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan-BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen-BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok perikanan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan-BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan perikanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Perikanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Perikanan-BPS.

Metode Penghitungan Output dan Nilai Tambah

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan adalah pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian.

Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis, yaitu output utama dan output ikutan. Disamping itu, komoditi lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Penghitungan output pada lapangan usaha ini tidak hanya mencakup output utama dan ikutan pada saat panen tetapi juga ditambahkan output yang diadopsi dari implementasi SNA 2008.

Untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas yang dapat diambil hasilnya berulang kali, outputnya juga mencakup biaya perawatan yang dikeluarkan selama periode tertentu yang dinamakan dengan *Cultivated Biological Resources* (CBR). Sedangkan untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas semusim atau yang diambil hasilnya hanya sekali, outputnya juga mencakup biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di akhir periode dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di awal periode yang disebut sebagai *Work-in-Progress* (WIP). Sehingga total output pada lapangan usaha ini merupakan penjumlahan dari nilai output utama, output ikutan, dan CBR atau WIP dari seluruh komoditas ditambah dengan nilai pelengkapannya.

NTB suatu sub lapangan usaha diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap kegiatan usaha yang menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga dasar dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara (*intermediate consumption*). Estimasi NTB atas dasar harga konstan 2010 menggunakan metode revaluasi, yaitu mengalikan produksi di tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar (tahun 2010) untuk mengestimasi output konstan tahun berjalan.

2.2. Pertambangan dan Penggalian

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam lapangan usaha ini dikelompokkan dalam empat golongan pokok, yaitu: pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi

Sub lapangan usaha pertambangan minyak, gas dan panas bumi meliputi kegiatan produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam serta pencarian cairan hidrokarbon. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan operasi dan/atau pengembangan lokasi penambangan minyak, gas alam, dan panas bumi.

Pendekatan penghitungan yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing periode penghitungan. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi.

Data produksi untuk pertambangan migas diperoleh dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), atau Dinas Pertambangan dan Energi. Data harga/indikator harga juga diperoleh dari Ditjen Migas, ESDM dan Statistik PLN, dan Indeks Harga Produsen (IHP) gas dan panas bumi sebagai penggerak harga gas alam dan panas bumi setiap triwulan; Data struktur biaya diperoleh dari Laporan Keuangan Perusahaan, BEI dan Statistik Pertambangan Migas-BPS. Data harga minyak mentah menggunakan *Indonesia Crude Price (ICP)*, harga gas bumi pada tahun 2010 yang digerakkan berdasarkan IHP gas dan panas bumi. Harga uap panas bumi menggunakan harga panas bumi yang terdapat pada publikasi tahunan Statistik PLN dan digerakkan dengan IHP gas dan panas bumi untuk mendapatkan harga triwulanan.

2. Pertambangan Batubara dan Lignit

Pertambangan batubara mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencarian (*liquefaction*).

Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan untuk meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batubara dari kumpulan tepung bara.

Pertambangan lignit mencakup penambangan di permukaan tanah termasuk penambangan dengan metode pencairan dan kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan dan penyimpanan.

Untuk memperoleh output batubara dan lignit digunakan metode pendekatan produksi. NTB atas dasar harga konstan 2010 didapat dengan menggunakan cara yang sama seperti pada sub lapangan usaha pertambangan migas yaitu revaluasi. Data produksi batubara dan lignit serta Harga Batubara Acuan (HBA) diperoleh dari Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM; Statistik Pertambangan Non Migas-BPS serta beberapa data dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota; Dinas Pendapatan Daerah.

3. Pertambangan Bijih Logam

Sub lapangan usaha ini mencakup pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium, tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain. Termasuk bijih logam mulia lainnya. Kelompok bijih logam mulia lainnya mencakup pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya.

Beberapa jenis produknya, antara lain: pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi, pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium (bauksit), tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt, dan lain-lain; serta pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya. Penghitungan output bijih logam menggunakan metode pendekatan produksi dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan deflator IHP tembaga dan emas.

4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Sub lapangan usaha ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian selain tersebut di atas. Termasuk dalam sub lapangan usaha ini adalah komoditi garam hasil penggalian. Output dan produksi barang-barang galian terdapat pada publikasi Statistik Penggalian tahunan. Sementara itu PDRB triwulan di estimasi menggunakan data produksi bahan galian dari Survei Khusus yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi-BPS.

2.3. Industri Pengolahan

Lapangan usaha industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk lapangan usaha industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

1. **Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi;**
Mencakup kegiatan perubahan minyak, gas bumi dan batubara menjadi produk yang bermanfaat seperti: pengilangan minyak dan gas bumi, dimana meliputi pemisahan minyak bumi menjadi produk komponen melalui teknis seperti pemecahan dan penyulingan.

Produk khas yang dihasilkan: kokas, butane, propane, petrol, gas hidrokarbon dan metan, gasoline, minyak tanah, gas etane, propane dan butane sebagai produk penyulingan minyak. Termasuk disini adalah pengoperasian tungku batubara, produksi batubara dan semi batubara, gas batubara, ter, lignit dan kokas. KBLI 2009: kode 19.

2. Industri Makanan dan Minuman; Sub lapangan usaha ini merupakan gabungan dari dua golongan pokok, yaitu industri makanan dan industri minuman. Industri makanan mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan. Industri minuman mencakup pembuatan minuman, baik minuman beralkohol maupun tidak beralkohol, air minum mineral, bir dan anggur, dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran, minuman dengan bahan baku susu, dan pembuatan produk teh, kopi dan produk teh dengan kadar kafein yang tinggi. KBLI 2009: kode 10 dan 11.
3. Industri Pengolahan Tembakau; Pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing dan pemotongan serta pengeringan tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau. Beberapa produk yang dihasilkan rokok dan cerutu, tembakau pipa, tembakau sedot (*snuff*), rokok kretek, rokok putih dan lain-lain. KBLI 2009: kode 12
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; Sub lapangan usaha ini merupakan gabungan dari dua golongan pokok yaitu Industri Tekstil dan Industri Pakaian Jadi. Industri tekstil mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti: spreng, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali, dan lain-lain). Industri pakaian jadi mencakup semua pekerjaan menjahit dari semua bahan dan semua jenis pakaian dan aksesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju anak-anak dan orang dewasa, atau pakaian tradisional dan modern.

Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu). Contoh produk yang dihasilkan: kain tenun ikat, benang, kain, batik, rajutan, pakaian jadi, pakaian sesuai pesanan, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 13 dan 14.

5. Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki; Golongan pokok ini mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 15.
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman; Golongan pokok ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, golongan pokok ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Golongan pokok ini tidak mencakup pembuatan *meubelair*, atau perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya. Contohnya: pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso, papan, pengolahan rotan, kayu lapis, barang-barang bangunan dari kayu, kerajinan dari kayu, alat dapur dari kayu, rotan dan bambu. KBLI 2009: kode 16.
7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam; Sub lapangan usaha ini merupakan gabungan dari dua golongan pokok yaitu industri kertas dan barang dari kertas, dan industri pencetakan dan reproduksi media rekaman.

Industri kertas dan barang dari kertas mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan. Pembuatan dari produk-produk tersebut merupakan satu rangkaian dengan tiga kegiatan utama. Kegiatan pertama pembuatan bubur kertas, lalu yang kedua pembuatan kertas yang menjadi lembaran-lembaran dan yang ketiga barang dari kertas dengan berbagai teknik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama. Industri pencetakan dan reproduksi media rekaman mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan industri pencetakan; proses pencetakan termasuk bermacam-macam metode/cara untuk memindahkan suatu *image* dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui/dengan berbagai teknologi pencetakan. KBLI 2009: kode 17 dan 18.

8. Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional; Golongan pokok ini terdiri dari dua industri yaitu industri kimia dan industri farmasi dan obat tradisional. Industri kimia mencakup perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Ciri produk kimia dasar yaitu yang membentuk kelompok industri pertama dari hasil produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya. Industri farmasi dan obat tradisional mencakup pembuatan produk farmasi dasar dan preparat farmasi. Golongan ini mencakup antara lain preparat darah, obat-obatan jadi, preparat diagnostik, preparat medis, obat tradisional atau jamu dan produk botanikal untuk keperluan farmasi. KBLI 2009: kode 20 dan 21.
9. Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik; Golongan pokok ini mencakup pembuatan barang plastik dan karet dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Misalnya; pembuatan karet alam, pembuatan ban karet untuk semua jenis kendaraan dan peralatan, pengolahan dasar plastik atau daur ulang.

Namun demikian tidak berarti bahwa semua barang dari bahan baku karet dan plastik termasuk di golongan ini, misalnya industri alas kaki dari karet, industri lem, industri matras, industri permainan dari karet, termasuk kolam renang mainan anak-anak. KBLI 2009: kode 22.

10. Industri Barang Galian Bukan Logam; Kegiatan ini mencakup pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti gelas dan produk gelas, produk keramik dan tanah liat bakar, semen dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya juga termasuk disini. KBLI 2009: kode 23.
11. Industri Logam Dasar; Golongan pokok ini mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bongkahan dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi. Contoh produk: industri besi dan baja dasar, penggilingan baja, pipa, sambungan pipa dari baja, logam mulia, logam dasar bukan besi dan lain-lain. KBLI 2009: kode 24
12. Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik; Golongan ini mencakup pembuatan produk logam “murni” (seperti suku cadang, *container*/wadah dan struktur), pada umumnya mempunyai fungsi statis atau tidak bergerak, pembuatan perlengkapan senjata dan amunisi, pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya, pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik. KBLI 2009: kode 25, 26 dan 27.
13. Industri Mesin dan Perlengkapan; Kegiatan yang tercakup dalam golongan pokok industri mesin dan perlengkapan adalah pembuatan mesin dan peralatan yang dapat bekerja bebas baik secara mekanik atau yang berhubungan dengan pengolahan bahan-bahan, termasuk komponen mekaniknya yang menghasilkan dan menggunakan tenaga dan komponen utama yang dihasilkan secara khusus.

Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus untuk angkutan penumpang atau barang dalam dasar pembatasan, peralatan tangan, peralatan tetap atau bergerak tanpa memperhatikan apakah peralatan tersebut dibuat untuk keperluan industri, pekerjaan sipil, dan bangunan, pertanian dan rumah tangga. KBLI 2009: kode 28.

14. Industri Alat Angkutan; Golongan pokok ini mencakup Industri kendaraan bermotor dan semi trailer serta industri alat angkutan lainnya. Cakupan dari golongan ini adalah pembuatan kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang atau barang, alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara dan pesawat angkasa. Golongan ini juga mencakup pembuatan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor, termasuk pembuatan trailer atau semi-trailer. KBLI 2009: kode 29 dan 30.
15. Industri Furnitur; Industri furnitur mencakup pembuatan *meubelair* dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen dan keramik. Pengolahan pembuatan *meubelair* adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan, pencetakan dan pelapisan. Perancangan produk baik untuk estetika dan kualitas fungsi adalah aspek yang penting dalam proses produksi. Pembuatan *meubelair* cenderung menjadi kegiatan yang khusus. KBLI 2009: kode 31.
16. Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan; Sub lapangan usaha ini mencakup pembuatan berbagai macam barang yang belum dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini. Sub lapangan usaha ini merupakan gabungan dari industri pengolahan lainnya dan jasa reparasi serta pemasangan mesin dan peralatan. Golongan pokok ini bersifat residual, proses produksi, bahan input dan penggunaan barang-barang yang dihasilkan dapat berubah-ubah secara luas dan ukuran umum.

Sub lapangan usaha ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga. Tetapi mencakup perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan khusus barang-barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan dan produk lainnya. KBLI 2009: kode 32 dan 33.

Sumber data industri pengolahan batubara dan pengilangan minyak dan gas bumi terdiri dari: Data produksi pengilangan migas diperoleh dari Ditjen Migas-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Data produksi/ indikator produksi industri batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Industri-BPS. Data harga produk pengilangan minyak bumi diperoleh dari Ditjen Migas-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, harga LNG diperoleh dari harga ekspor LNG dari Direktorat Statistik Distribusi-BPS dengan kurs ekspor dari Direktorat Neraca Pengeluaran-BPS; sedangkan indikator harga untuk industri batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Harga-BPS. Data struktur biaya diperoleh dari Publikasi Statistik Pertambangan Migas-BPS.

Sumber data industri makanan dan minuman sampai dengan industri pengolahan lainnya, jasa reparasi, dan pemasangan mesin dan peralatan terdiri dari: Produksi/indikator produksi yang dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu indeks produksi Industri Besar Sedang (IBS) dan indeks produksi Industri Mikro dan Kecil (IMK) diperoleh dari Direktorat Statistik Industri-BPS; Data harga/indikator harga diperoleh dari Direktorat Statistik Harga-BPS; Data struktur biaya diperkirakan dari Hasil Survei Tahunan IBS dan Hasil Survei Tahunan IMK-BPS ditambah dengan berbagai Survei Khusus yang dilakukan DNP BPS.

Pendekatan penghitungan untuk kegiatan industri pengolahan migas menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku adalah merupakan perkalian antara produksi dengan harga untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga konstan digunakan cara revaluasi, yaitu produksi pada masing-masing tahun dikalikan dengan harga pada tahun dasar 2010. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih output atas dasar harga konstan dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan.

Pendekatan estimasi untuk industri batubara sampai dengan industri pengolahan lainnya, jasa reparasi, dan pemasangan mesin dan peralatan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga konstan menggunakan pendekatan ekstrapolasi yaitu perkalian antara output tahun dasar dengan indeks produksi untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga berlaku dihitung dari output atas dasar harga konstan dikalikan indeks harga pada masing-masing tahun NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari output atas dasar harga konstan dikurangi dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan. Dalam penghitungan NTB industri pengolahan sub lapangan usaha ini, tabel SUT 2010 menjadi acuan sebagai tahun dasar 2010.

2.4. Pengadaan Listrik dan Gas

Lapangan usaha D mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es.

Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan. Lapangan usaha ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC.

1. Ketenagalistrikan; Golongan ini mencakup pembangkitan, pengiriman dan penyaluran tenaga listrik kepada konsumen, baik yang diselenggarakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) maupun oleh perusahaan swasta (Non-PLN), seperti pembangkitan listrik oleh perusahaan milik Pemerintah Daerah, dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan) dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan distribusi, dan listrik yang dicuri. Metode penghitungan dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga dasar per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga dasar per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB. Sumber data produksi berupa listrik terjual dan listrik dibangkitkan baik oleh PLN maupun non-PLN. Penilaian PDB listrik menggunakan harga dasar, sementara penilaian PDRB listrik menggunakan harga produsen. Harga produsen didapat dengan mengalikan kuantum listrik terjual dengan harga jual tersubsidi. Sementara harga dasar diestimasi dari harga produsen ditambahkan dengan subsidi yang ditanggung oleh pemerintah dan dikurangi pajak.

-
2. Pengadaan Gas dan Produksi Es; Golongan ini menghasilkan gas alam, gas buatan, uap/air panas, udara dingin dan produksi es. Golongan ini mencakup pembuatan gas dan pendistribusian gas alam atau gas buatan ke konsumen melalui suatu sistem saluran pipa, dan kegiatan penjualan gas. Golongan ini juga mencakup penyediaan gas melalui berbagai proses, pengangkutan, pendistribusian dan penyediaan semua jenis bahan bakar gas, penjualan gas kepada konsumen melalui saluran pipa. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang mengurus perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian perubahan komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas. Kegiatan pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es mencakup kegiatan produksi, pengumpulan dan pendistribusian uap dan air panas untuk pemanas, energi dan tujuan lain, produksi dan distribusi pendinginan udara, pendinginan air untuk tujuan pendinginan dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan.

Metode Penghitungan dan Sumber Data

Metode penghitungan yang digunakan untuk seri 2010 dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010.

Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB. Sumber data produksi dan harga gas kota diperoleh dari PT. PGN (Persero).

Data produksi dilaporkan langsung oleh PT. PGN setiap tiga bulan. Sementara data harga dikutip dari laporan keuangan PT. PGN yang terbit setiap tiga bulanan. Untuk data harga, terdapat jeda satu triwulan sehingga harus diestimasi untuk triwulan terakhir.

2.5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk lapangan usaha ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

Metode Penghitungan dan Sumber Data

Metode penghitungan NTB untuk pengadaan air tahun dasar 2010 sama dengan seri 2000 dengan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Dan untuk data harga yang tidak tersedia pada tahun terakhir diperkirakan dengan kenaikan laju IHK komponen bahan bakar, penerangan dan air bersih. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Penghitungan pengelolaan sampah/limbah dengan pendekatan pendapatan. Dalam lembar kerja pengelolaan, pembuangan dan pembersihan sampah dilakukan oleh Pemerintah dan swasta.

Kegiatan yang dilakukan pemerintah menggunakan APBN/APBD. Sumber Data: untuk data produksi adalah Subdit Statistik Pertambangan dan Energi-BPS, APBD-Kementerian Keuangan; data output sampah diperoleh dari Subdit Statistik IBS-BPS; Data harga diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen-BPS; Data struktur biaya diperoleh dari Hasil Survei Tahunan Air Bersih-BPS.

2.6. Konstruksi

Lapangan usaha konstruksi adalah kegiatan usaha dibidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Hasil kegiatan konstruksi antara lain: konstruksi gedung tempat tinggal; konstruksi gedung bukan tempat tinggal; konstruksi bangunan sipil, misal: jalan, tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase, sanitasi, tanggul pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya; konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi: pembangkit tenaga listrik; transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi, dan sebagainya; instalasi gedung dan bangunan sipil: instalasi listrik termasuk alat pendingin dan pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase, dan sejenisnya.

Pengerukan: meliputi pengerukan sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan ringan, sedang maupun berat; penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya; penyelesaian konstruksi sipil seperti pemasangan kaca dan aluminium; pengerjaan lantai, dinding dan plafon gedung; pengecatan; pengerjaan interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir; pengerjaan eksterior dan pertamanan pada gedung dan bangunan sipil lainnya; penyewaan alat konstruksi dengan operatornya seperti derek lori, molen, bulldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, dan sejenisnya.

Metode Penghitungan dan Sumber Data

Metode yang digunakan untuk memperkirakan output harga berlaku lapangan usaha konstruksi adalah metode ekstrapolasi dengan indeks konstruksi harga berlaku sebagai ekstrapolatornya. Untuk mendapatkan output harga konstan, output harga berlaku dideflasi dengan menggunakan IHPB konstruksi sebagai deflator. Sementara input antara didapat dengan menggunakan metode *commodity flow* beberapa komoditas utama dari input antara, misalnya produksi semen, kayu, juga bahan galian. NTB berlaku didapat dari nilai output berlaku dikurangi dengan biaya antara berlaku. Sementara NTB konstan didapat dari mengalikan output konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data indikator produksi kayu log, bambu dan produk industri bukan migas dari Subdirektorat Neraca Barang-BPS; produksi aspal dari Statistik Perminyakan Indonesia (SPI) Ditjen Migas-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); ekspor semen dari Subdirektorat Statistik Ekspor-BPS dan Asosiasi Semen Indonesia (ASI); impor semen dan bahan bangunan SITC 3 digit dari Subdirektorat Statistik Impor-BPS. Indikator harga berupa IHPB bahan bangunan dari Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar-BPS. Indeks konstruksi dari publikasi Statistik Konstruksi, Subdirektorat Statistik Konstruksi-BPS.

2.7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Lapangan usaha ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Lapangan usaha ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perumahan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, *mail-order houses*, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

1. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; Sub lapangan usaha ini mencakup semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, sebagaimana perdagangan besar dan eceran,

perawatan dan pemeliharaan mobil dan motor baru maupun bekas. Termasuk perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesoris mobil dan motor, juga mencakup kegiatan agen komisi yang terdapat dalam perdagangan besar dan eceran kendaraan.

2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; Sub lapangan usaha ini mencakup kegiatan ekonomi dibidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan selain produk mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi) juga merupakan cakupan dalam sub lapangan usaha ini.

Metode Penghitungan dan Sumber Data

Output lapangan usaha perdagangan adalah margin perdagangan, yaitu nilai jual dikurangi nilai beli barang yang diperdagangkan setelah dikurangi biaya angkutan yang dikeluarkan oleh pedagang. Output perdagangan (berlaku/konstan) dihitung menggunakan metode tidak langsung, yaitu menggunakan metode pendekatan arus barang "*commodity flow approach*". Margin perdagangan diperoleh dengan mengalikan rasio margin perdagangan dengan output barang yang dihasilkan oleh industri penghasil barang domestik ditambah impor barang dari luar negeri. Kemudian output atau margin perdagangan tersebut dikalikan dengan rasio nilai tambah untuk memperoleh nilai tambah perdagangan. Sedangkan reparasi mobil dan sepeda motor dihitung dengan pendekatan produksi, dengan indikator produksinya adalah jumlah kendaraan. Untuk mendapatkan nilai tambah konstannya, nilai tambah berlaku yang diperoleh di deflate menggunakan IHK umum (BPS).

Sumber data yang digunakan dalam lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor adalah data output barang dari industri domestik (dari Subdit Neraca Barang dan Neraca Jasa-BPS), Statistik Transportasi (BPS), Impor barang (BPS), Indeks Harga Konsumen (BPS) dan survei lainnya yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi-BPS.

2.8. Transportasi dan Pergudangan

Lapangan usaha ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

1. Angkutan Rel; Angkutan rel untuk penumpang dan atau barang yang menggunakan jalan rel kereta melalui antar kota, dalam kota dan pengoperasian gerbong tidur atau gerbong makan kereta api yang sepenuhnya dikelola oleh PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI). Metode estimasi yang digunakan yaitu pendekatan produksi. Indikator produksi adalah jumlah penumpang dan barang yang diangkut atau jumlah km-penumpang dan km-ton barang. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diolah dari laporan keuangan PT. KAI. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan rel dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi yaitu dengan menggunakan jumlah penumpang dan barang sebagai ekstrapolatornya. NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh berdasarkan perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun 2010.

2. Angkutan Darat; Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk pula kegiatan charter/sewa kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi; serta jasa angkutan dengan saluran pipa untuk mengangkut minyak mentah, gas alam, produk minyak, kimia dan air. Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian antara indikator produksi (jumlah kendaraan wajib uji) dengan indikator harga (rata-rata output untuk masing-masing jenis alat angkut). Sedangkan output atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dengan indeks jumlah kendaraan sebagai ekstrapolatornya. NTB dihitung berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. Indikator produksi berupa jumlah kendaraan/armada wajib uji (taksi, angkot, bis, dan truk) diperoleh dari Subdirektorat Info Lantas POLRI. Data untuk penghitungan struktur output dan rasio NTB diperoleh dari laporan keuangan PT. Perusahaan Pengangkutan Djakarta (Perum PPD), PT. Djawatan Angkutan Motor RI (Perum DAMRI) dan beberapa perusahaan angkutan darat *go public* dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.
3. Angkutan Laut; Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan ke luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu kesatuan usaha, dimana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang kegiatan induknya dan data yang tersedia sulit untuk dipisahkan.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya. Output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode ekstrapolasi, yaitu indeks produksi jumlah penumpang dan indeks muat barang sebagai ekstrapolatornya. Sedangkan NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. Indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut dari PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang dan rata-rata output per barang diperoleh dari PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) dan PT. Djakarta Lloyd, serta IHK jasa angkutan laut dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public* angkutan laut dari Bursa Efek Indonesia.

4. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan; Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kendaraan dengan menggunakan kapal/angkutan sungai dan danau baik bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal ferry. Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harga yang terdiri dari angkutan sungai, danau serta penyeberangan. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi rata-rata tertimbang jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Selanjutnya, NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. Data indikator produksi berupa jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut diperoleh dari publikasi tahunan Statistik Perhubungan-Kementerian Perhubungan.

Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang, rata-rata output per barang dan rata-rata output per kendaraan diperoleh dari PT. Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry, serta IHK jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan dari Subdit Statistik Harga Konsumen-BPS. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba PT. ASDP Indonesia Ferry.

5. Angkutan Udara; Kegiatan ini meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di Indonesia. Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut, atau jumlah km-penumpang dan ton-km barang yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya untuk masing-masing angkutan penumpang dan barang, baik domestik maupun internasional. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut. Sedangkan NTB diperoleh dengan mengalikan rasio NTB dengan outputnya untuk masing-masing harga tersebut. Data indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut diperoleh dari PT. Angkasa Pura I (Kawasan Tengah dan Timur Indonesia) dan PT. Angkasa Pura II (Kawasan Barat Indonesia). Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang/km-penumpang dan rata-rata output per barang/km-ton barang diperoleh dari laporan perusahaan penerbangan nasional, PT. Garuda Indonesia Airlines dan PT. Merpati Nusantara Air-lines; serta IHK jasa angkutan udara dari Subdit Statistik Harga Konsumen-BPS.
6. Jasa Penunjang Angkutan, Pergudangan dan Pos dan Kurir; Mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan

pengangkutan, yaitu jasa-jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat (terminal dan parkir), jasa pelayanan bongkar muat barang darat dan laut, keagenan penumpang, jasa ekspedisi, jalan tol, pergudangan, jasa pengujian kelayakan angkutan darat dan laut, jasa penunjang lainnya, pos dan jasa kurir. Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Nilai output dan NTB atas dasar harga berlaku dari hasil pengolahan data pendapatan dan pengeluaran/biaya dari laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public*. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode deflasi, yaitu dengan membagi nilai output atas dasar berlaku dengan indeks harga tahun dasar 2010. Nilai NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan jasa penunjang angkutan diperoleh dari badan usaha milik negara, seperti : PT. Angkasa Pura I dan II, PT. Pelabuhan Indonesia I-IV, PT. Jasa Marga, PT. Varuna Tirta Prakasya, PT. Bhandha Ghara Reksha, PT. PBM Adhiguna Putera, PT. KBN, dan beberapa perusahaan *go public* dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan indikator harga berupa IHK sarana penunjang transpor dari Subdit Statistik Harga Konsumen -BPS.

2.9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Lapangan usaha ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam lapangan usaha ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

-
1. Penyediaan Akomodasi; Sub lapangan usaha ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung atau pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya (seperti asrama atau rumah kos dengan makan maupun tidak dengan makan). Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau dengan makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi. Yang dimaksud akomodasi jangka pendek seperti hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap selama kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan, alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan. NTB sub lapangan usaha akomodasi diperoleh dengan menggunakan pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah malam kamar terjual dan indikator harganya adalah rata-rata tarif per malam kamar. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harganya. Sedangkan NTB diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB. Output dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode revaluasi. Data produksi menggunakan data malam kamar terjual dari Subdit Statistik Pariwisata-BPS. Indikator harga menggunakan data tarif dari Survei Hotel Tahunan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Pariwisata-BPS.
 2. Penyediaan Makan dan Minum; Kegiatan sub lapangan usaha ini mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran *self service* atau restoran *take away*, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung outputnya yaitu melalui pendekatan produksi. Indikator produksinya berupa jumlah penduduk pertengahan tahun. Dan indikator harganya berupa pengeluaran rata-rata per kapita atas makan minum jadi di luar rumah. Hasil perkalian kedua indikator tersebut diperoleh output atas dasar harga berlaku. Sedangkan, output atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi, dengan IHK kelompok makanan jadi, minuman, dan rokok sebagai deflator. Dan NTB atas dasar harga berlaku maupun konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB. Data indikator produksi sub lapangan usaha penyediaan makan dan minum bersumber dari Proyeksi Penduduk Indonesia, Sensus Penduduk 2010-BPS. Sedangkan data indikator harga diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan IHK makanan jadi, minuman dan rokok dari publikasi Indikator Ekonomi-BPS.

2.10. Informasi dan Komunikasi

Lapangan usaha ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Lapangan usaha ini terdiri dari beberapa industri yaitu penerbitan, produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik, penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi), telekomunikasi, pemrograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi.

Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik, penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk penerbitan (cetakan, elektronik atau audio, pada internet, sebagai produk multimedia seperti cd rom buku referensi dan lain-lain).

Kegiatan industri produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, video tape atau disk untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain. Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya, tercakup disini. Selain itu juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi perekaman master suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, penerbitan musik seperti kegiatan jasa perekaman suara dalam studio atau tempat lain.

Kegiatan industri penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi) ini mencakup pembuatan muatan atau isi siaran atau perolehan hak untuk menyalurkannya dan kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi dan program hiburan, berita, perbincangan dan sejenisnya. Juga termasuk penyiaran data, khususnya yang terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV.

Kegiatan industri telekomunikasi ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa yaitu pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video. Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini dapat berdasar pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Umumnya kegiatan ini adalah transmisi dari isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya.

Kegiatan industri pemrograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian dibidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan pendukung piranti lunak; perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak komputer dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien serta kegiatan profesional lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan teknis komputer.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku didapat dari nilai produksi/pendapatan hasil olahan survei industri besar dan sedang, serta laporan keuangan perusahaan-perusahaan *go public* bergerak di industri informasi dan telekomunikasi, sedangkan NTB atas dasar harga berlaku didapat dari penjumlahan upah dan gaji, laba/rugi, penyusutan, dan komponen-komponen lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode deflasi, dan NTB atas dasar harga konstan didapat dari perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan informasi diperoleh dari Subdit Statistik Industri Besar dan Sedang dan Subdit Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi-BPS, perusahaan *go public* dibidang televisi dan teknologi informasi, Direktorat Perfilman Dirjen Ekraf Seni dan Budaya Kememparekraf, sedangkan kegiatan telekomunikasi diperoleh dari perusahaan telekomunikasi *go public* seperti: PT. Telkom dan anak perusahaannya, PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel); PT. Indosat dan anak perusahaannya, Excel Axiata; PT. Bakrie Telecom; dan PT. Smartfren Telecom. Sedangkan indikator harga berupa indeks harga seperti: IHP percetakan dan penerbitan dari Subdit Statistik Harga Produsen-BPS; IHK umum dan IHK jasa komunikasi dari Subdit Statistik Harga Konsumen-BPS.

2.11. Jasa Keuangan dan Asuransi

Lapangan usaha ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Lapangan usaha ini juga mencakup kegiatan pemegang aset, seperti kegiatan perusahaan *holding* dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

-
1. Jasa Perantara Keuangan; Kegiatan yang dicakup didalam jasa perantara keuangan adalah kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, seperti: menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka pendek/menengah dan panjang. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok jasa perantara keuangan sedangkan memberikan jasa lainnya hanya kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga, dan sebagainya. Kegiatan jasa perantara keuangan tersebut antara lain bank sentral, perbankan konvensional maupun syariah, baik bank pemerintah pusat dan daerah, bank swasta nasional, bank campuran dan asing, dan bank perkreditan rakyat, juga koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, baitul maal wantanwil dan jasa perantara moneter lainnya. Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi untuk bank komersial (termasuk BPR) dan pendekatan pengeluaran untuk bank sentral (Bank Indonesia). Output atas dasar harga berlaku dari usaha bank komersial adalah jumlah penerimaan atas jasa pelayanan bank yang diberikan kepada pemakainya, seperti biaya administrasi atas transaksi dengan bank, dan imputasi jasa implisit bank yang diukur dengan menggunakan metode FISIM, juga pendapatan lainnya yang diperoleh karena melakukan kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga. Output bank sentral (Bank Indonesia) dihitung adalah jumlah atas biaya-biaya yang dikeluarkan, termasuk konsumsi antara, pengeluaran untuk upah/gaji pegawai, pajak, dan penyusutan. Sedangkan output KSP, BMT dan jasa moneter lainnya diperoleh dengan mengalikan rata-rata pendapatan usaha dengan masing-masing jumlah usahanya.

Penghitungan NTB atas dasar harga konstan 2010 dilakukan dengan menggunakan metode deflasi dan sebagai deflatornya adalah IHK Umum dan Indeks Implisit PDRB tanpa jasa perantara keuangan. Data output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari Bank Indonesia.

2. Asuransi dan Dana Pensiun; Asuransi dan dana pensiun mencakup penjaminan tunjangan hari tua serta polis asuransi, dimana premi tersebut diinvestasikan untuk digunakan terhadap klaim yang akan datang. Asuransi dan reasuransi adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang usaha pokoknya menanggung resiko-resiko atas terjadinya musibah/kecelakaan terhadap barang atau orang, termasuk tunjangan hari tua. Pihak tertanggung dapat menerima biaya atas hancur/rusaknya barang atau karena terjadinya kematian pihak tertanggung. Golongan ini mencakup kegiatan asuransi jiwa, asuransi non jiwa dan reasuransi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah. Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan asuransi dan reasuransi merupakan penjumlahan dari hasil *underwriting*, hasil investasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana IHK umum digunakan sebagai deflator. NTB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan-BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen-BPS. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala atau sekaligus pada masa pensiun sebagai santunan hari tua/uang pensiun.

Dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan dana pensiun merupakan hasil pengolahan laporan keuangan kegiatan tersebut. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana IHK umum digunakan sebagai deflator. NTB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan dana pensiun diperoleh dari OJK dan Subdirektorat Statistik Keuangan-BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen-BPS.

3. Jasa Keuangan Lainnya; Jasa keuangan lainnya meliputi kegiatan jasa keuangan yang mencakup kegiatan *leasing*, kegiatan pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara keuangan, serta kegiatan pendistribusian dana bukan dalam bentuk pinjaman. Sub lapangan usaha ini mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang, dan jasa keuangan lainnya. Pegadaian, mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan. Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan pegadaian merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT. Pegadaian yang terdiri dari pendapatan sewa modal, pendapatan administrasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana IHK umum digunakan sebagai deflator.

NTB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari OJK, PT. Pegadaian, dan Subdirektorat Statistik Keuangan-BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen-BPS. Lembaga Pembiayaan, mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan anjak piutang, dan pembiayaan leasing lainnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi mencakup kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk *finance lease* untuk digunakan oleh penyewa (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pembiayaan konsumen, mencakup usaha pembiayaan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Pembiayaan kartu kredit, mencakup usaha pembiayaan dalam transaksi pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit. Pembiayaan anjak piutang, mencakup usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang suatu perusahaan. Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan lembaga pembiayaan merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan pembiayaan. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana IHK umum digunakan sebagai deflator. NTB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari OJK dan Subdirektorat Statistik Keuangan-BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen-BPS.

Modal ventura mencakup kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu. Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan modal ventura. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana IHK umum digunakan sebagai deflator. NTB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari OJK dan Subdirektorat Statistik Keuangan-BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen-BPS.

4. Jasa Penunjang Keuangan; Jasa penunjang keuangan meliputi kegiatan yang menyediakan jasa yang berhubungan erat dengan aktivitas jasa keuangan, asuransi, dan dana pensiun. Sub lapangan usaha ini mencakup kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek), manager investasi, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, wali amanat, jasa penukaran mata uang, jasa broker asuransi dan reasuransi, dan kegiatan penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun lainnya.

Administrasi Pasar Uang (Bursa Efek)

Administrasi pasar uang (bursa efek) mencakup usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana perdagangan efek. Kegiatannya mencakup operasi dan pengawasan pasar uang, seperti bursa kontrak komoditas, bursa surat berharga, serta bursa saham. Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi.

Output dari kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT. Bursa Efek Indonesia yang terdiri

dari pendapatan jasa transaksi efek, jasa pencatatan, jasa informasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana IHK umum digunakan sebagai deflator. NTB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) diperoleh dari PT. BEI, dan Subdirektorat Statistik Keuangan-BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen-BPS.

Manager Investasi

Manager investasi mencakup usaha mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan manager investasi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana IHK umum digunakan sebagai deflator. NTB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan manager investasi diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan-BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen-BPS.

Lembaga Kliring dan Penjaminan

Lembaga kliring dan penjaminan mencakup usaha menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi.

Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT. KPEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana IHK umum digunakan sebagai deflator. NTB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga kliring dan penjaminan diperoleh dari PT. KPEI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen-BPS.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian mencakup usaha menyelenggarakan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain, serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana IHK umum digunakan sebagai deflator. NTB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga penyimpanan dan penyelesaian diperoleh dari PT. KSEI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen-BPS.

Wali Amanat

Wali amanat (*trustee*) mencakup kegiatan usaha pihak yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi. Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar

harga berlaku adalah pendekatan produksi.

Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan wali amanat. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana IHK umum digunakan sebagai deflator. NTB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan wali amanat diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan-BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen-BPS.

Jasa Penukaran Mata Uang

Jasa penukaran mata uang (*money changer*) mencakup usaha jasa penukaran berbagai jenis mata uang, termasuk pelayanan penjualan mata uang. Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan jasa penukaran mata uang. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana IHK umum digunakan sebagai deflator. NTB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa penukaran mata uang diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan-BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen-BPS.

Jasa Broker Asuransi dan Reasuransi

Jasa broker asuransi dan reasuransi mencakup usaha yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi milik tertanggung kepada perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai penanggung. Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi.

Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan broker asuransi dan reasuransi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana IHK umum digunakan sebagai deflator. NTB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa broker asuransi dan reasuransi diperoleh dari OJK dan Subdirektorat Statistik Keuangan-BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen-BPS.

2.12. Real Estat

Lapangan usaha ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya, bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Lapangan usaha ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estat adalah properti berupa tanah dan bangunan.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk sewa rumah, kontrak rumah, sewa beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah, pajak dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per m². NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya indeks luas bangunan.

Sumber data usaha persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh berdasarkan hasil Susenas dan Sensus Penduduk-BPS (imputasi sewa rumah). Sedangkan data produksi usaha persewaan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil penelitian asosiasi.

Struktur input pada usaha persewaan bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa (SKSPJ)-BPS.

2.13. Jasa Perusahaan

Lapangan usaha jasa perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) lapangan usaha, yakni lapangan usaha M dan lapangan usaha N. Lapangan usaha M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus yang tersedia untuk pengguna.

Lapangan usaha yang termasuk lapangan usaha M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya. Lapangan usaha N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum.

Kegiatan yang termasuk lapangan usaha N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

Jasa Hukum

Jasa hukum mencakup usaha jasa pengacara/penasihat hukum, notaris, lembaga bantuan hukum, serta jasa hukum lainnya.

Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa

Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan mencakup usaha jasa pembukuan, penyusunan, dan analisis laporan keuangan, persiapan atau pemeriksaan laporan keuangan dan pengujian laporan serta sertifikasi keakuratannya. Termasuk juga jasa konsultasi perpajakan.

Jasa Arsitek dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Lainnya

Jasa arsitek dan teknik sipil serta konsultasi teknis mencakup usaha jasa konsultasi arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan *drafting*, jasa arsitektur perencanaan perkotaan, jasa arsitektur pemugaran bangunan bersejarah, serta jasa inspeksi gedung atau bangunan.

Jasa Periklanan

Jasa periklanan mencakup usaha jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Termasuk juga kegiatan menciptakan dan menempatkan iklan di surat kabar, majalah/ tabloid, radio, televisi, internet, dan media lainnya.

Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil

Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil mencakup usaha jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya.

Jasa Penyaluran Tenaga Kerja

Jasa penyaluran tenaga kerja mencakup usaha jasa penampungan dan penyaluran para tuna karya yang siap pakai, seperti agen penyalur jasa tenaga kerja Indonesia, agen penyalur pembantu rumah tangga, dan lainnya.

Jasa Kebersihan Umum Bangunan

Jasa kebersihan umum bangunan mencakup usaha jasa kebersihan bermacam jenis gedung, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan, dan gedung sekolah. Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output kategori jasa perusahaan atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi.

Output diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode revaluasi. NTB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB. Sumber data berupa jumlah tenaga kerja diperoleh dari Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan-BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen-BPS.

2.14. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Lapangan usaha ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan Negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan sosial wajib. Kegiatan yang diklasifikasikan di lapangan usaha lain dalam KBLI tidak termasuk pada lapangan usaha ini, meskipun dilakukan oleh Badan Pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistim sekolah (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada lapangan usaha ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk lapangan usaha pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada lapangan usaha Q.

NTB administrasi pemerintahan atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan seluruh belanja pegawai dari kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jasa pemerintahan lainnya ditambah dengan penyusutan. Perkiraan NTB atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan cara ekstrapolasi. Dan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri sipil menurut golongan kepangkatan sebagai ekstrapolatornya.

Data bersumber dari Realisasi APBN, Direktorat Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan; Realisasi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan; Statistik Keuangan Pemerintah daerah (K1, K2, K3)-BPS; Realisasi APBD-Biro Keuangan Pemerintah Daerah; Jumlah pegawai negeri sipil-Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

2.15. Jasa Pendidikan

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Lapangan usaha ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

Penghitungan NTB jasa pendidikan Pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, dan untuk jasa pendidikan swasta menggunakan pendekatan produksi. Untuk NTB jasa pendidikan Pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan jasa pendidikan swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Berbagai Survei Khusus yang dilakukan DNP dan DNPeng BPS; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

2.16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan

kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktek Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (*Medical Evacuation*); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial.

Metode penghitungan untuk jasa pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, sedangkan swasta menggunakan pendekatan produksi. NTB jasa kesehatan dan kegiatan sosial pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Kesehatan; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas); Berbagai Survei Khusus yang dilakukan DNP BPS; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

2.17. Jasa Lainnya

Lapangan usaha jasa lainnya merupakan gabungan 4 lapangan usaha pada KBLI 2009. Lapangan usaha ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

Kesenian, Hiburan dan Rekreasi

Jasa kesenian, hiburan dan rekreasi berkategori R didalam KBLI 2009. Lapangan usaha ini meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan hiburan, kesenian, dan kreativitas, termasuk perpustakaan, arsip, museum, kegiatan kebudayaan lainnya, kegiatan perjudian dan pertarungan, serta kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan produksi, yaitu output diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga. Output panggung hiburan/kesenian dihitung berdasarkan pajak tontolan yang diterima pemerintah. Output untuk jasa hiburan dan rekreasi lainnya pada umumnya didasarkan pada hasil perkalian antara jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja masing-masing dengan rata-rata output per indikatornya. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi/ekstrapolasi dengan deflator/ekstrapolatornya adalah IHK rekreasi dan olahraga/indeks indikator produksi yang sesuai.

Sumber data produksi jasa kesenian, hiburan dan rekreasi diperoleh dari beberapa sumber, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan data penunjang intern BPS (Ketenagakerjaan, Susenas, Sensus Ekonomi, Statistik Harga Konsumen, dan Survei-survei Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran).

Kegiatan Jasa Lainnya

Kegiatan ini berkategori S yang mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, serta berbagai kegiatan jasa perorangan lainnya.

Output atas dasar harga berlaku untuk jasa lainnya diperoleh dari perkalian antara masing-masing jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan untuk memperoleh output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi dimana deflatornya adalah IHK Umum. Sumber data yang diperlukan berasal dari data penunjang intern BPS (Sensus Ekonomi, Subdit Statistik Demografi, Susenas, Statistik Harga Konsumen).

Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan

Kegiatan ini berkategori T di KBLI 2009, mencakup kegiatan yang memanfaatkan jasa perorangan yang melayani rumah tangga yang didalamnya termasuk jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya), dan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan (didalamnya termasuk kegiatan pertanian, industri, penggalian, konstruksi, dan pengadaan air).

Output atas dasar harga berlaku untuk jasa perorangan yang melayani rumah tangga/jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya) diperoleh dari perkalian antara pengeluaran per kapita untuk jasa pekerja domestik dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sedangkan NTB-nya sama dengan output yang dihasilkan karena konsumsi antara pekerja jasa domestik merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga majikan.

Untuk kegiatan yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan, (pertanian, industri, konstruksi, penggalian) output dan NTB berlaku diperoleh dengan hasil survei intern BPS (SKTIR). Sedangkan output pengadaan air diperoleh

dengan pendekatan rumah tangga yang menggunakan pompa dan sumur, baik sumur terlindung maupun tidak terlindung.

Sementara itu, output dan NTB atas dasar harga konstan, baik untuk kegiatan pekerja domestik maupun kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk digunakan sendiri oleh rumah tangga diperoleh dengan menggunakan metode deflasi dengan deflatornya laju IHK umum. Sumber data lapangan usaha ini diperoleh dari intern BPS, yaitu, Susenas, Sensus Penduduk, Subdit PEK (Publikasi Statistik Air Bersih), dan Survei Khusus yang Dilakukan Direktorat Neraca Pengeluaran.

Kegiatan Badan Internasional dan Ekstra Internasional Lainnya

Lapangan usaha ini berkategori U yang mencakup kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilannya, Badan Regional dan lain-lain, termasuk *The Internasional Moneter Fund*, *The World Bank*, *The World Customs Organization* (WHO), *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), *The Organization of Petroleum Exporting Countries* (OPEC) dan lain-lain.

Output dan NTB berlaku diperoleh dengan pendekatan biaya yang didapatkan dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya. Sementara, untuk output konstan diperoleh dengan metode deflasi dengan deflator laju IHK umum. Sumber data diperoleh dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya yang berkantor pusat di Indonesia dan Statistik Harga Konsumen.

BAB III. TINJAUAN EKONOMI JAKARTA BARAT

PDRB Jakarta Barat atas dasar harga berlaku tahun 2012 mencapai 228,38 triliun rupiah, meningkat menjadi 359,24 triliun rupiah pada tahun 2016, dengan demikian selama tahun 2012 hingga 2016 rata-rata besaran PDRB atas dasar harga berlaku per tahun di Jakarta Barat sebesar 293,54 triliun rupiah.

Bila dibandingkan dengan total PDRB seluruh DKI Jakarta, PDRB Jakarta Barat selama tahun 2012 - 2016 rata-rata pada kisaran 16,61 persen terhadap total PDRB kabupaten/kota se-DKI Jakarta. Kontribusinya yang cukup besar ikut mewarnai perkembangan perekonomian Jakarta Barat cukup mempengaruhi kondisi perekonomian DKI Jakarta.

Tabel 3.1. Perbandingan PDRB DKI Jakarta dan PDRB Jakarta Barat 2012-2016 (Milyar Rupiah)

Tahun	PDRB DKI Jakarta	PDRB Jakarta Barat	Persentase
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
2012	1 369 432,6	228 382,5	16,68
2013	1 546 876,5	258 677,8	16,72
2014	1 762 316,4	292 981,7	16,62
2015*	1 989 329,5	328 396,8	16,51
2016**	2 177 119,9	359 245,2	16,50

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Jika 17 lapangan usaha dikelompokkan menjadi 3 sektor utama, yakni sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier, maka terlihat lapangan usaha sektor tersier masih menjadi andalan dengan kontribusi sebesar 76,87 persen pada tahun 2016, kemudian disusul sektor sekunder yang berkontribusi cukup tinggi sebesar 23,04 persen, sedangkan sektor primer memberikan kontribusi paling kecil sebesar 0,09 persen.

Lapangan usaha yang termasuk dalam kelompok sektor tersier adalah Lapangan Usaha Perdagangan, Transportasi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Real Estat dan Jasa-jasa lainnya. Sementara yang masuk dalam kategori sektor sekunder adalah Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Listrik, Gas, Air Bersih dan Konstruksi, dan yang termasuk sektor primer adalah Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Dominannya sektor tersier membuat perekonomian Jakarta Barat masih berpotensi untuk berkembang lebih luas dan tumbuh lebih cepat sejalan dengan semakin berkembangnya teknologi dan gaya hidup masyarakat Jakarta.

Tinjauan lebih lengkap mengenai perekonomian Jakarta Barat selama periode 2012-2016 akan diuraikan sebagaimana berikut.

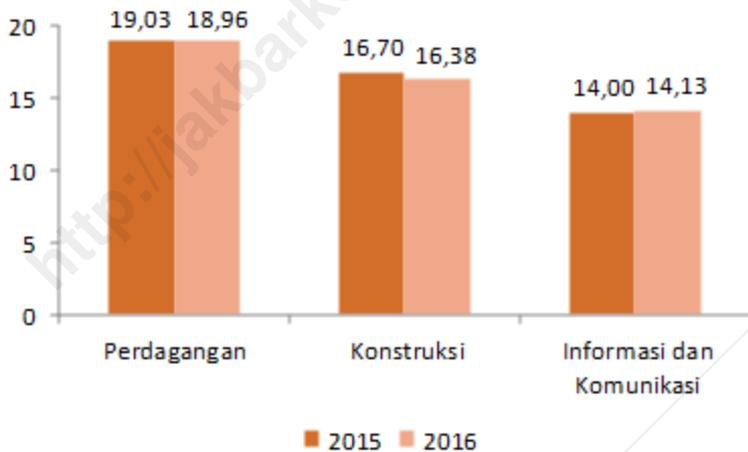
3.1. Struktur Ekonomi

Ditinjau menurut kontribusi setiap lapangan usaha terhadap PDRB Jakarta Barat, tiga lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Jakarta Barat adalah Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; kedua Lapangan Usaha Konstruksi, dan ketiga Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi.

Ketiganya memberikan kontribusi sekitar 49,48 persen terhadap total PDRB Jakarta Barat.

Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi penyumbang terbesar dengan nilai kontribusi sebesar 18,96 persen pada tahun 2016. Kontribusi yang diberikan lapangan usaha ini lebih kecil dari yang dicapai tahun 2015 yaitu sebesar 19,03 persen. Berikutnya adalah Lapangan Usaha Konstruksi dengan kontribusi sebesar 16,38 persen. Nilai ini lebih kecil dibandingkan pada tahun 2015 sebesar 16,70 persen. Kontribusi terbesar berikutnya diberikan oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 14,13 persen. Kontribusi yang diberikan oleh lapangan usaha ini lebih besar dari yang dicapai tahun 2015 sebesar 14,00 persen.

Grafik 3.1. Distribusi Persentase Beberapa Lapangan Usaha, 2015-2016 (Persen)



Sementara itu, lapangan usaha yang memberikan kontribusi terkecil, di bawah 1 persen terhadap PDRB Jakarta Barat adalah Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas (0,24 persen), Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0,09 persen), serta Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (0,05 persen).

3.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro ekonomi penting yang dapat digunakan untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah. Perekonomian suatu wilayah mengalami pertumbuhan positif bila seluruh balas jasa riil pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Produk PDRB atas dasar harga konstan 2010 Jakarta Barat pada tahun 2016 sebesar 264,25 triliun rupiah, mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 yaitu sebesar 249,26 triliun rupiah.

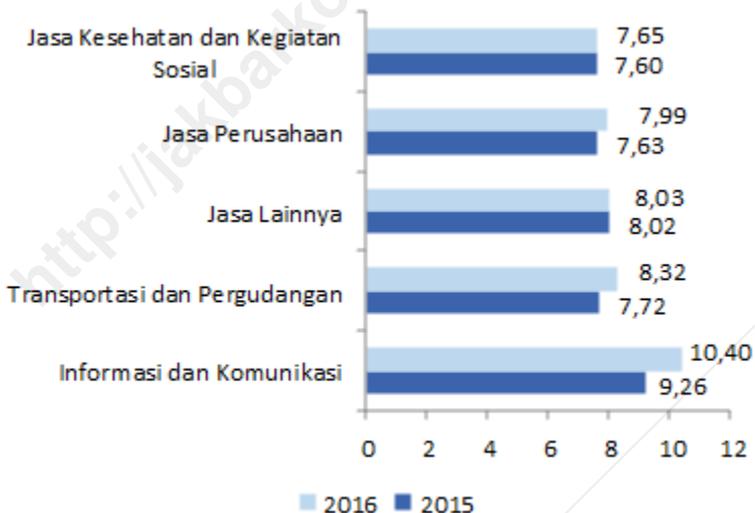
Perekonomian Jakarta Barat pada tahun 2016 tumbuh sebesar 6,01 persen. Angka ini naik dibanding tahun 2015 yang tumbuh sebesar 5,99 persen. Berbeda halnya dengan perekonomian DKI Jakarta, dimana pada tahun 2016 tumbuh sebesar 5,85 persen, melambat dibanding tahun 2015 yang tumbuh sebesar 5,89 persen.

Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016 dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,40 persen pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,26 persen.

Pertumbuhan kedua diikuti oleh Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,32 persen. Pertumbuhan pada lapangan usaha ini meningkat dibandingkan pertumbuhan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,72 persen.

Pertumbuhan tertinggi ketiga dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 8,03 persen. Pertumbuhan lapangan usaha ini meningkat sedikit dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 8,02 persen. Lapangan Usaha Jasa Perusahaan menempati urutan keempat yang tumbuh sebesar 7,99 persen tahun 2016 dan 7,63 persen tahun 2015. Sementara itu, lapangan usaha kelima dicapai oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,65 persen tahun 2016 dan 7,60 persen pada tahun 2015.

Grafik 3.2. Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha, Tahun 2015-2016 (Persen)



3.3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita diperoleh dari nilai PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. Pada tahun 2016, PDRB per kapita Jakarta Barat mencapai 143,93 juta rupiah, meningkat bila dibandingkan tahun 2015 yang senilai 133,30 juta rupiah. Rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku selama periode tahun 2012-2016 adalah 10,23 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 11,69 persen.

**Tabel 3.2. PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016
(Juta Rupiah)**

PDRB per kapita	ADH Berlaku	
	Nilai (juta Rp.)	Laju (%)
(1)	(2)	(3)
2012	96,67	9,27
2013	107,94	11,65
2014	120,55	11,69
2015*	133,30	10,58
2016**	143,93	7,97

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

BAB IV. PERKEMBANGAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

PDRB Jakarta Barat menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 lapangan usaha yang kemudian dirinci lagi menjadi sub lapangan usaha. Pemecahan sub lapangan usaha ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

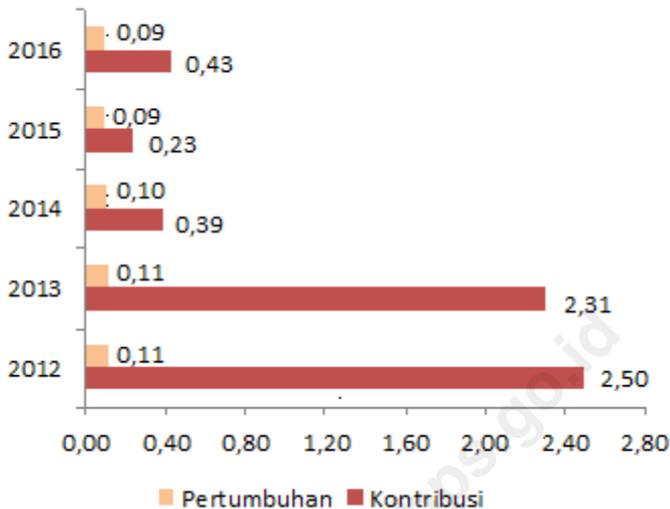
4.1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (A)

Lapangan usaha ini mencakup sub lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan. Kemudian sub lapangan usaha kehutanan dan penebangan kayu, dan sub lapangan usaha perikanan.

Kontribusi lapangan usaha ini selama periode 2012 hingga 2016 menunjukkan trend penurunan. Pada tahun 2012-2013 lapangan usaha ini berkontribusi 0,11 persen dan turun menjadi 0,10 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2015-2016 kontribusinya mengalami penurunan menjadi 0,09 persen dari total PDRB Jakarta Barat atas dasar harga berlaku.

Dari sisi laju pertumbuhan, selama periode 2012 hingga 2015 pertumbuhan yang dicapai oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan terus melambat, dimana pada tahun 2012 pertumbuhannya mencapai 2,50 persen, kemudian melambat menjadi 2,31 persen pada tahun 2013, 0,39 persen pada tahun 2014 dan 0,23 persen pada tahun 2015. Pada tahun 2016, laju pertumbuhan PDRB sektor ini meningkat menjadi sebesar 0,43 persen.

Gambar 4.1. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 2012-2016 (Persen)



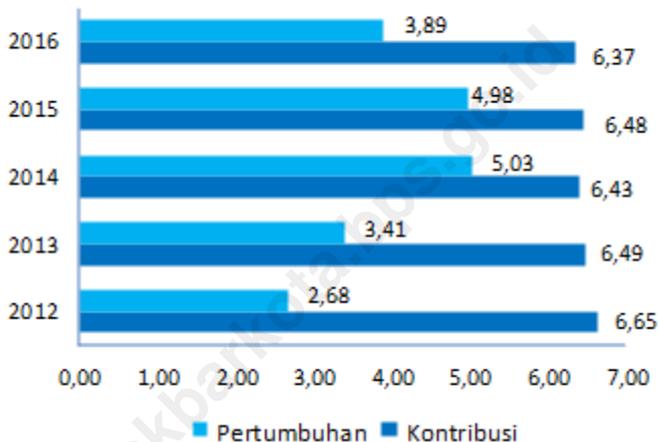
4.2. Industri Pengolahan (C)

Lapangan usaha ini mencakup 16 Subkategori Industri Pengolahan, mulai dari Subkategori Industri Batubara dan Pengilangan Migas sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

Nilai tambah Industri Pengolahan selama periode 2012-2016 rata-rata mencapai 19 triliun rupiah. Selama periode tersebut, lapangan usaha ini memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan PDRB Jakarta Barat rata-rata sekitar 6,49 persen tiap tahunnya. Kontribusi lapangan usaha ini pada tahun 2016 kembali turun setelah beberapa tahun sebelumnya menunjukkan trend penurunan. Bila pada tahun 2012-2014 kontribusinya semakin menurun masing-masing sebesar 6,65 persen; 6,49 persen dan 6,43 persen, namun pada tahun 2015 kontribusinya naik menjadi 6,48 persen, kemudian turun menjadi 6,37 persen pada tahun 2016.

Dari sisi laju pertumbuhan, selama periode 2012 hingga 2015 pertumbuhan usaha Industri Pengolahan cukup baik, dimana pada tahun 2012 pertumbuhannya mencapai 2,68 persen, kemudian meningkat menjadi 3,41 persen pada tahun 2013, dan 5,03 persen pada tahun 2014. Namun, di tahun 2015 pertumbuhannya melambat menjadi 4,98 persen. Penurunan tersebut terjadi pula pada tahun 2016 menjadi 3,89 persen.

Gambar 4.2. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan, 2012-2016 (Persen),

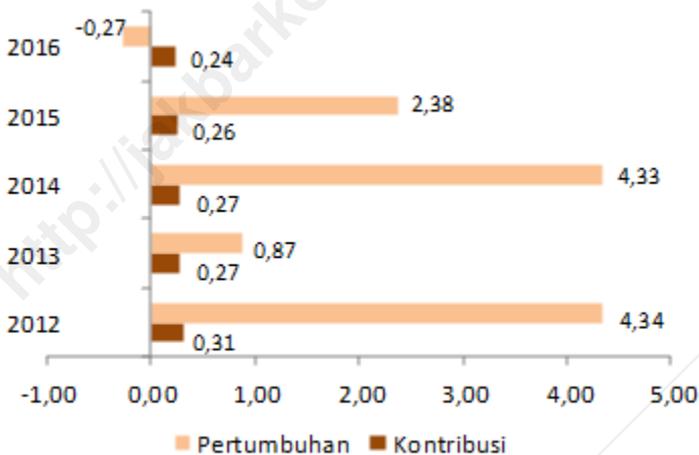


4.3. Pengadaan Listrik dan Gas (D)

Nilai tambah Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas selama periode 2012-2016 rata-rata mencapai 781,61 milyar rupiah. Kontribusi lapangan usaha ini kurang dari 1 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2012 kontribusinya mencapai 0,31 persen kemudian terus menurun menjadi 0,27 persen pada tahun 2013 dan 2014 dan 0,26 persen pada tahun 2015. Pada tahun 2016, kontribusi lapangan usaha ini juga menurun menjadi 0,24 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha pengadaan listrik dan gas selama periode 2012-2015 berfluktuatif. Pada tahun 2012 pertumbuhannya cukup tinggi hingga mencapai 4,34 persen. Namun, pada tahun 2013, pertumbuhannya melambat hanya sebesar 0,87 persen. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2013, Pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) mulai per 1 Januari 2013 dan bertahap sebanyak 4 kali dalam rentang 3 bulan berikutnya, sehingga menyebabkan konsumsi listrik menurun. Pada tahun 2014, TDL juga mengalami kenaikan namun tidak sebanyak pada tahun 2013 sehingga laju pertumbuhan lapangan usaha ini mampu sedikit meningkat menjadi 4,33 persen. Kontribusi lapangan usaha ini semakin menurun pada tahun 2015 dan 2016. Bahkan pada tahun 2016 menurun hingga mencapai laju pertumbuhan sebesar -0,27 persen.

Gambar 4.3 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Pengadaan Listrik dan Gas, 2012-2016 (Persen)

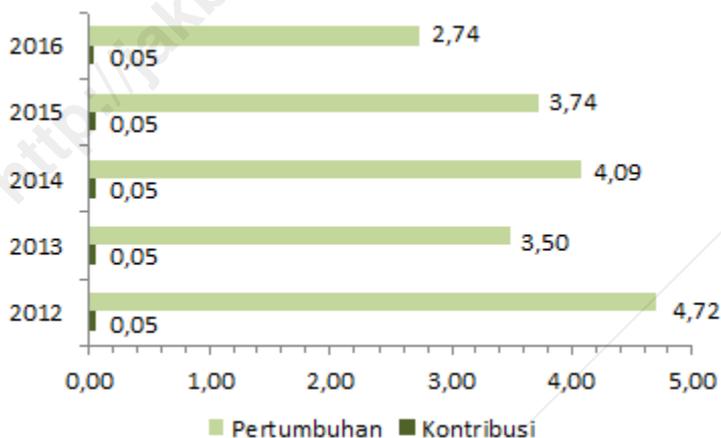


4.4. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (E)

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan, dan lain-lain. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian.

Nilai tambah Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang selama periode 2012-2016 rata-rata mencapai 142,74 miliar rupiah. Kontribusi lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB tergolong kecil dan stabil yaitu sebesar 0,05 persen dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Sementara itu, laju pertumbuhannya cenderung berfluktuatif, yaitu sebesar 4,72 persen tahun 2012, kemudian melambat 3,50 persen pada tahun 2013, meningkat kembali 4,09 persen pada tahun 2014, dan melambat kembali pada tahun 2015 dan 2016 yaitu menjadi sebesar 3,74 persen dan 2,74 persen.

Gambar 4.4. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 2012-2016 (Persen)



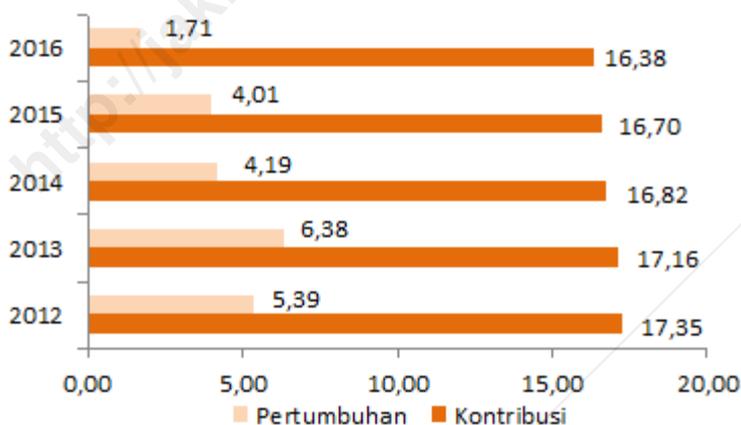
4.5. Konstruksi (F)

Lapangan Usaha Konstruksi menjadi salah satu lapangan usaha andalan Jakarta Barat yang merupakan penyumbang terbesar kedua dari total PDRB. Rata-rata nilai tambah yang diciptakan oleh lapangan usaha konstruksi per tahun selama periode 2012-2016 adalah sebesar 49,39 triliun rupiah.

Lapangan usaha konstruksi selama periode 2012-2016 kontribusinya semakin menurun. Pada tahun 2012, kontribusinya mencapai 17,35 persen, kemudian sedikit menurun menjadi 17,16 persen pada tahun 2013; 16,82 persen pada tahun 2014, 16,70 persen pada tahun 2015, dan 16,38 persen pada tahun 2016.

Laju pertumbuhan yang dicapai oleh Lapangan Usaha Konstruksi selama periode 2012-2016 cenderung melambat. Pada tahun 2012, angka pertumbuhannya mencapai 5,39 persen, kemudian meningkat menjadi 6,38 persen pada tahun 2013. Pada tahun-tahun berikutnya, pertumbuhannya semakin melambat hingga mencapai 1,71 persen pada tahun 2016.

Gambar 4.5. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Konstruksi, 2012-2016 (Persen)

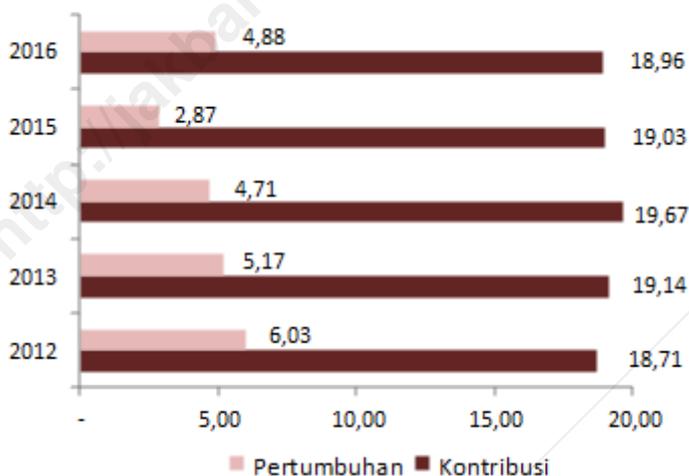


4.6. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G)

Lapangan usaha ini terdiri dari Subkategori Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya dan Subkategori Perdagangan Besar dan Eceran selain Kendaraan Bermotor. Lapangan usaha ini merupakan lapangan usaha dengan nilai tambah terbesar di Jakarta Barat. Sepanjang tahun 2012 hingga 2016, rata-rata nilai tambah yang tercipta di lapangan usaha ini adalah 56,1 triliun rupiah per tahun.

Selama periode 2012-2016, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang rata-rata 19,10 persen. Pada tahun 2014, kontribusi lapangan usaha ini sebesar 19,67 persen terhadap total perekonomian Jakarta Barat. Kontribusi ini merupakan yang tertinggi selama periode 2012-2016. Setelah tahun 2014, kontribusinya semakin menurun hingga mencapai 18,96 persen pada tahun 2016.

Gambar 4.6. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 2012-2016 (Persen)



Sementara itu, laju pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor selama periode 2012-2015 semakin melambat. Pada tahun 2012, pertumbuhan lapangan usaha ini sebesar 6,03 persen, kemudian semakin melambat hingga mencapai 2,87 persen pada tahun 2015. Pada tahun 2016, laju pertumbuhan sektor ini meningkat menjadi 4,88 persen.

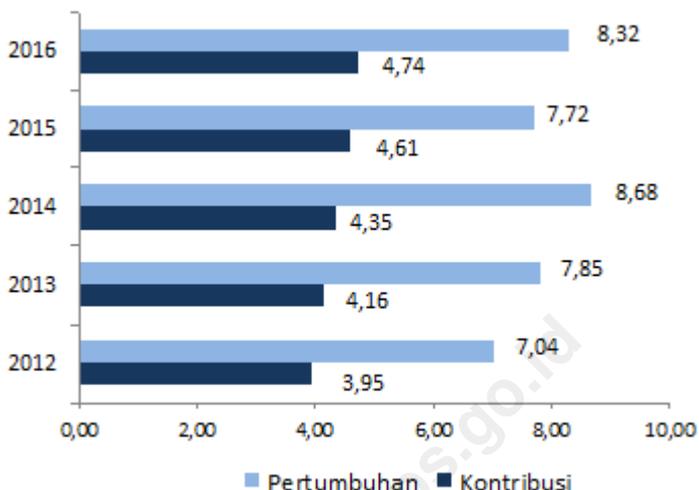
4.7. Transportasi dan Pergudangan (H)

Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan terdiri atas Subkategori Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Angkutan Udara, dan Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir. Nilai tambah yang tercipta dari lapangan usaha ini selama periode tahun 2012-2016 rata-rata mencapai 12,9 triliun rupiah per tahun. Besarnya nilai tambah yang tercipta terutama didorong oleh nilai tambah Subkategori Angkutan Rel, Angkutan Darat, Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan Pos

Bila dicermati perkembangannya selama periode 2012-2016, kontribusi yang diberikan oleh lapangan usaha ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 kontribusinya sebesar 3,95 persen, kemudian terus meningkat hingga mencapai 4,74 persen pada tahun 2016.

Sementara itu, selama periode 2012-2016 laju pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan cukup tinggi yaitu di atas 7 persen. Pada tahun 2012 laju pertumbuhan mencapai 7,04 persen dan kian meningkat hingga mencapai 8,68 persen pada tahun 2014. Pertumbuhan sektor ini sedikit melambat pada tahun 2015 yaitu menjadi 7,72 persen dan pada tahun 2016, pertumbuhannya meningkat kembali menjadi 8,32 persen.

Gambar 4.7. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Transportasi dan Pergudangan, 2012-2016 (Persen)



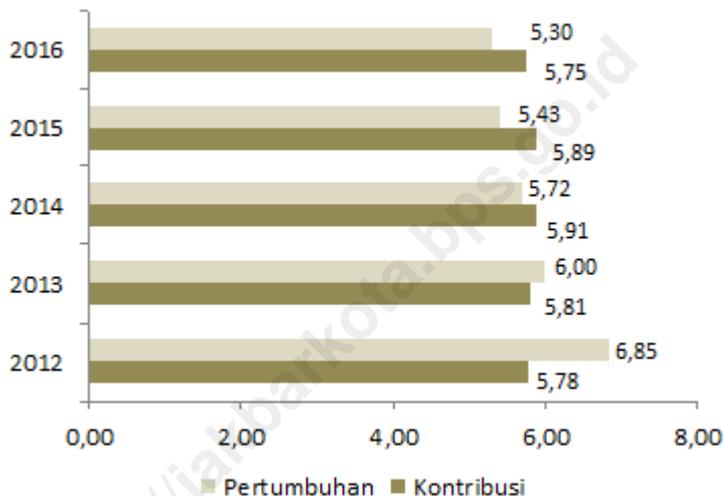
4.8. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I)

Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memiliki dua subkategori, yakni Subkategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum. Selama periode 2012-2016 rata-rata nilai tambah per tahun yang tercipta pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum adalah sebesar 17,1 triliun rupiah.

Kontribusi lapangan usaha ini selama periode 2012-2014 menunjukkan adanya tren peningkatan. Pada tahun 2012 lapangan usaha ini berkontribusi sebesar 5,78 persen, kemudian meningkat menjadi 5,81 persen pada tahun 2013 dan 5,91 persen pada tahun 2014. Namun, pada tahun berikutnya, kontribusi lapangan usaha ini sedikit mengalami penurunan hingga mencapai 5,75 persen pada tahun 2016.

Laju pertumbuhan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum selama periode 2012-2016 menunjukkan trend penurunan. Pada tahun 2012 lapangan usaha ini tumbuh cukup tinggi sebesar 6,85 persen, kemudian terus melambat menjadi sebesar 6,00 persen pada tahun 2013; 5,72 persen pada tahun 2014; 5,43 persen pada tahun 2015; dan 5,30 persen pada tahun 2016.

Gambar 4.8. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 2012-2016 (Persen)



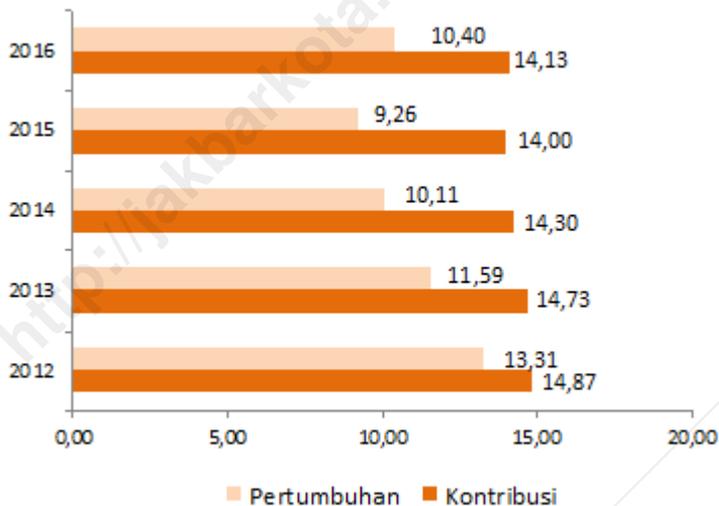
4.9. Informasi dan Komunikasi (J)

Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi memiliki peran yang strategis pada era globalisasi saat ini, dimana alat komunikasi seluler menjadi sarana komunikasi favorit yang sangat mudah, hemat dan cepat. Kemajuan teknologi yang dicapai oleh lapangan usaha ini turut andil dalam mendorong pertumbuhan lapangan usaha lainnya. Selama periode 2012-2016 rata-rata besarnya nilai tambah lapangan usaha ini adalah 42,14 triliun rupiah.

Pada tahun 2016, lapangan usaha ini memberikan kontribusi terbesar ketiga terhadap total PDRB Jakarta Barat. Pada tahun 2012, kontribusi yang diberikan oleh lapangan usaha ini sebesar 14,87 persen, kemudian terus menurun hingga mencapai 14 persen pada tahun 2015. Selanjutnya, pada tahun 2016, kontribusinya kembali meningkat menjadi 14,13 persen.

Laju pertumbuhan lapangan usaha informasi dan komunikasi pada periode 2012-2016 cukup tinggi rata-rata 10,93 persen. Pada tahun 2012, pertumbuhannya sebesar 13,31 persen dan semakin melambat hingga mencapai 9,26 persen pada tahun 2015., kemudian pada tahun 2016, laju pertumbuhannya ini menunjukkan adanya peningkatan kembali menjadi 10,40 persen.

Gambar 4.9. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Penyediaan Informasi dan Komunikasi, 2012-2016 (Persen)

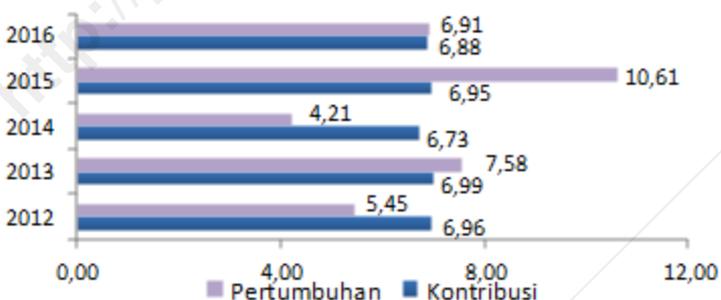


4.10. Jasa Keuangan dan Asuransi (K)

Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi terdiri atas Subkategori Jasa Perantara Keuangan, Subkategori Asuransi dan Dana Pensiun, Subkategori Jasa Keuangan Lainnya, dan Subkategori Jasa Penunjang Keuangan. Sepanjang periode tahun 2012 hingga 2016 rata-rata besarnya nilai tambah per tahun lapangan usaha ini adalah 20,25 triliun rupiah. Selama periode 2012-2016, kontribusi yang diberikan lapangan usaha ini berfluktuatif. Pada tahun 2012, kontribusinya mencapai 6,96 persen, dan meningkat menjadi 6,99 persen pada tahun 2013, kemudian pada tahun 2014, kontribusinya mengalami penurunan menjadi 6,73 persen. Pada tahun 2015, kontribusinya meningkat kembali menjadi 6,95 persen dan kemudian menurun kembali menjadi 6,88 persen pada tahun 2016.

Sama halnya dengan kontribusi terhadap PDRB, laju pertumbuhan lapangan usaha ini cenderung berfluktuatif pada tahun 2012-2016. Pada tahun 2012 pertumbuhannya mencapai 5,45 persen, meningkat menjadi 7,58 persen pada tahun 2013, melambat 4,21 persen pada tahun 2014, meningkat kembali 10,61 persen pada tahun 2015, dan kembali melambat menjadi 6,91 persen pada tahun 2016.

Gambar 4.10. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Jasa Keuangan dan Asuransi, 2012-2016 (Persen)

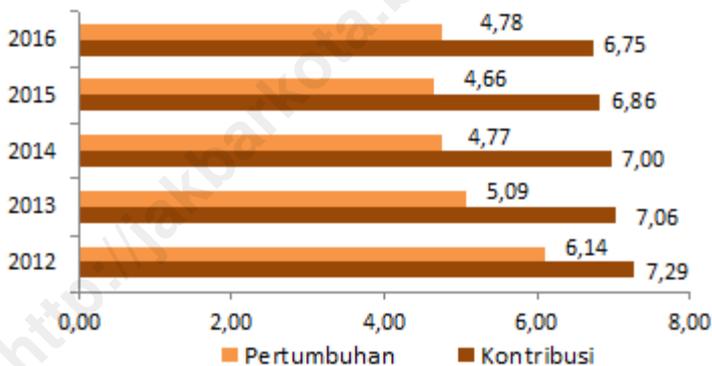


4.11. Real Estat (L)

Selama periode 2012-2016 rata-rata nilai tambah yang diciptakan oleh Lapangan Usaha Real Estat sekitar 20,44 triliun rupiah. Selama periode tersebut, kontribusi yang diberikan oleh lapangan usaha ini mengalami trend penurunan. Pada tahun 2012 kontribusinya sebesar 7,29 persen kemudian terus menurun hingga pada tahun 2016 mencapai 6,75 persen.

Sementara itu, selama periode 2012-2016 laju pertumbuhan Lapangan Usaha Real Estat cenderung mengalami trend perlambatan. Pada tahun 2012 lapangan usaha ini tumbuh pada kisaran 6,14 persen, kemudian terus melambat yaitu 5,09 persen pada tahun 2013; 4,77 persen pada tahun 2014 dan 4,66 persen pada tahun 2015. Namun, pada tahun 2016 laju pertumbuhannya sedikit meningkat menjadi 4,78 persen.

Gambar 4.11. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Real Estat, 2012-2016 (Persen)



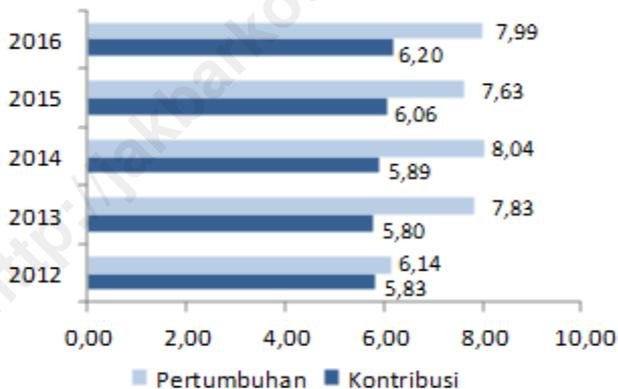
4.12. Jasa Perusahaan (M,N)

Lapangan usaha berikutnya menunjukkan kinerja yang luar biasa selama periode 2012-2016 adalah jasa perusahaan. Perkembangan kegiatan ekonomi turut mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi yang melayani usaha/perusahaan.

Selama periode tersebut rata-rata nilai tambah yang dihasilkan jasa perusahaan per tahun adalah sebesar 17,55 triliun rupiah. Selama tahun 2012-2016, kontribusi lapangan usaha ini cenderung meningkat, walaupun pada tahun 2013 sedikit mengalami penurunan. Pada tahun 2012, lapangan usaha ini berkontribusi sebesar 5,83 persen terhadap total PDRB, kemudian kontribusinya sedikit menurun menjadi 5,8 persen pada tahun 2013. Pada tahun-tahun selanjutnya, kontribusinya semakin meningkat hingga mencapai 6,20 persen pada tahun 2016.

Sementara itu, selama periode 2012-2016 pertumbuhan lapangan usaha ini berfluktuatif. Pada tahun 2012 pertumbuhannya mencapai 6,14 persen dan kian meningkat hingga mencapai 8,04 persen pada tahun 2014. Selanjutnya, pertumbuhannya melambat menjadi 7,63 persen pada tahun 2015 dan kembali meningkat menjadi 7,99 persen pada tahun 2016.

Gambar 4.12. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Jasa Perusahaan, 2012-2016 (Persen)



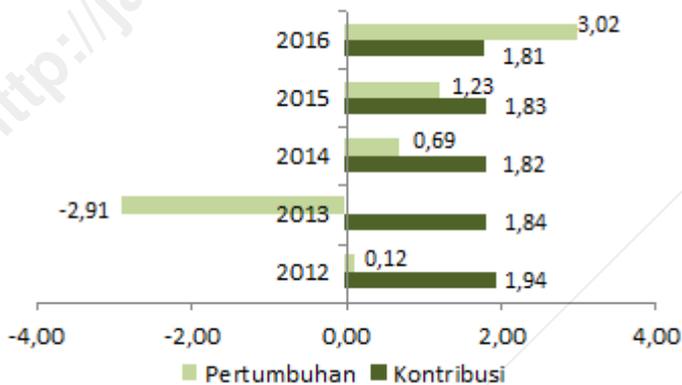
4.13. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O)

Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib meliputi kegiatan yang bentuknya keperintahan, yang

umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama periode 2012-2016, rata-rata nilai tambah yang diciptakan sebesar 5,4 triliun rupiah. Kontribusi yang diberikan lapangan usaha ini setiap tahunnya kurang dari dua persen. Pada tahun 2012, kontribusinya mencapai 1,94 persen pada tahun 2012, kemudian terus menurun hingga mencapai 1,82 persen pada tahun 2014. Kontribusi lapangan usaha ini pada tahun 2015 mengalami sedikit peningkatan menjadi 1,83 persen dan kemudian kembali mengalami penurunan menjadi 1,81 persen pada tahun 2016.

Sementara itu, laju pertumbuhan lapangan usaha ini cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2012 pertumbuhannya mencapai 0,12 persen, kemudian nilai tambahnya mengalami penurunan hingga menciptakan laju pertumbuhan sebesar -2,91 persen pada tahun 2013. Meskipun sempat mengalami penurunan yang cukup drastis, pertumbuhannya mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 3,02 persen pada tahun 2016.

Gambar 4.13. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 2012-2016 (Persen)

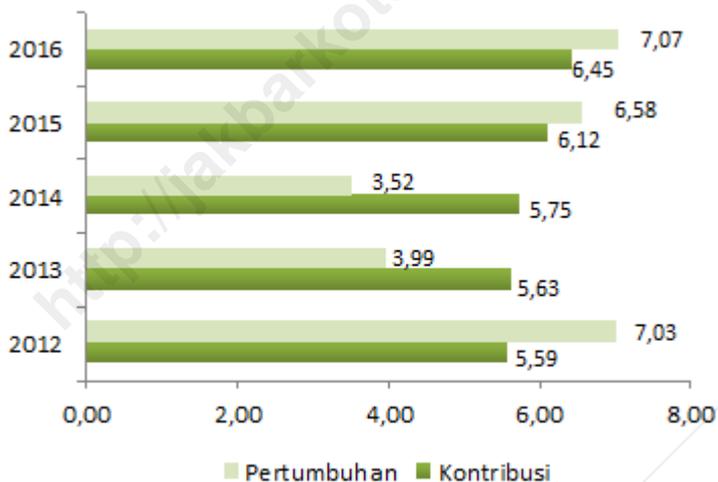


4.14. Jasa Pendidikan (P)

Selama periode 2012-2016, besarnya nilai tambah yang tercipta dari Lapangan Usaha Jasa Pendidikan rata-rata sebesar 17,49 triliun rupiah. Selama periode 2012-2016, kontribusi lapangan usaha ini terus meningkat. Pada tahun 2012 kontribusinya sebesar 5,59 persen dan terus meningkat hingga mencapai 6,45 persen pada tahun 2016.

Sementara itu, bila ditinjau dari sisi laju pertumbuhan, selama periode 2012-2016, pertumbuhan tertinggi yang dicapai oleh lapangan usaha ini terjadi pada tahun 2012 dengan nilai 7,03 persen, didorong oleh peningkatan kinerja kegiatan jasa pendidikan yang dilakukan oleh swasta. Pada tahun 2013 dan 2014 tumbuh melambat masing-masing sebesar 3,99 persen dan 3,52 persen, namun meningkat kembali menjadi 6,58 persen pada tahun 2015, dan 7,07 persen pada tahun 2016.

Gambar 4.14. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Jasa Pendidikan , 2012-2016 (Persen)



4.15. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q)

Selama periode 2012-2016, nilai tambah yang diciptakan oleh Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial setiap tahunnya rata-rata sebesar 5,48 triliun rupiah. Trend kontribusi yang diberikan oleh lapangan usaha ini terhadap PDRB Jakarta Barat setiap tahunnya menunjukkan peningkatan, meskipun peningkatannya hanya sedikit. Kontribusi yang diberikan lapangan usaha ini sebesar 1,80 persen pada tahun 2012; 1,82 persen pada tahun 2013; 1,85 persen pada tahun 2014; 1,88 persen pada tahun 2015; dan 1,93 persen pada tahun 2016.

Pola laju pertumbuhan yang dicapai oleh lapangan usaha ini cukup berfluktuatif selama periode 2012-2016. Pada tahun 2012 pertumbuhannya mencapai 8,03 persen dan melambat menjadi 5,53 persen pada tahun 2013. Laju pertumbuhan lapangan usaha ini kemudian semakin meningkat hingga mencapai 7,65 persen pada tahun 2016.

Gambar 4.15. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 2012-2016 (Persen)

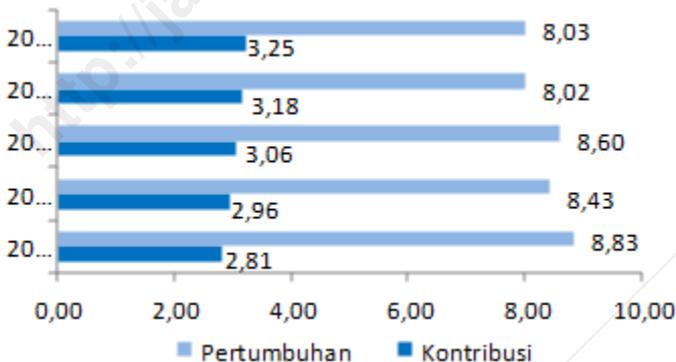


4.16. Jasa Lainnya (R,S,T,U)

Lapangan usaha jasa lainnya meliputi kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi, jasa perorangan yang melayani rumah tangga, dan kegiatan badan internasional dan ekstra internasional lainnya. Selama periode 2012-2016 rata-rata nilai tambah per tahun yang diciptakan oleh lapangan usaha ini adalah sebesar 9,03 triliun rupiah. Selama periode waktu tersebut, kontribusi yang diberikan oleh lapangan usaha ini terhadap PDRB Jakarta Barat menunjukkan trend peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2012 kontribusinya mencapai 2,81 persen pada tahun 2012; 2,96 persen pada tahun 2013; 3,06 persen pada tahun 2014; 3,18 persen pada tahun 2015, dan 3,25 persen pada tahun 2016.

Sementara itu laju pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Lainnya selama periode 2012-2015 berfluktuatif. Pada tahun 2012 laju pertumbuhannya mencapai 8,83 persen dan melambat menjadi 8,43 persen pada tahun 2013. Laju pertumbuhan lapangan usaha ini kemudian meningkat menjadi 8,60 persen pada tahun 2014, kembali melambat menjadi 8,02 persen pada tahun 2015, dan meningkat kembali menjadi 8,03 persen pada tahun 2016.

Gambar 4.16. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Jasa Lainnya, 2012-2016 (Persen)



LAMPIRAN

<http://jakbarkota.bp.go.id>

<http://jakbarkota.bps.go.id>

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Jakarta Barat, 2012-2016 (Miliar Rupiah)

	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	250,1	272,3	284,9	311,7	333,0
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	15 188,5	16 800,5	18 834	21 292,1	22 890,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	706,4	701,4	782,7	851,5	866,1
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	122,8	131,7	142,4	153,8	162,9
F	Konstruksi	39 616,0	44 388,3	49 283,2	54 830,2	58 839,3
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	42 724,1	49 501,5	57 630,7	62 507,4	68 126,6
H	Transportasi dan Pergudangan	9 010,4	10 754,7	12 743,6	15 132,8	17 024,4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13 208,2	15 024,6	17 310,3	19 347,5	20 671,0
J	Informasi dan Komunikasi	33 967,2	38 091,2	41 891,7	45 981,4	50 775,0
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	15 903,6	18 078,9	19 723,0	22 827,7	24 706,7
L	Real Estate	16 645,0	18 260,2	20 522,6	22 525,9	24 263,6
M,N	Jasa Perusahaan	13 303,8	15 004,0	17 261,0	19 907,7	22 286,4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4 437,6	4 752,7	5 333,9	6 012,8	6 486,4
P	Jasa Pendidikan	12 766,1	14 558,9	16 838,4	20 093,4	23 182,2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4 115,3	4 709,4	5 428,5	6 188,5	6 949,0
R,S,T,U	Jasa lainnya	6 417,1	7,647,3	8 970,8	10 432,3	11 682,3
	Produk Domestik Regional Bruto	228 382,5	258 677,8	292 981,7	328 396,8	359 245,2

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kota Jakarta Barat, 2012-2016 (Miliar Rupiah)

	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	223,2	228,4	229,3	229,8	230,8
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	13 038,5	13 483,1	14 161,5	14 867,2	15 445,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	506,2	510,6	532,7	545,4	543,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	118,1	122,3	127,3	132,0	135,6
F	Konstruksi	35 523,7	37 790,0	39 371,7	40 948,6	41 648,0
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	39 039,5	41 057,2	42 990,9	44 224,3	46 382,8
H	Transportasi dan Pergudangan	8 257,2	8 905,7	9 678,9	10 426,1	11 293,4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11 609,1	12 305,4	13 009,4	13 715,6	14 443,0
J	Informasi dan Komunikasi	33 950,5	37 884,4	41 715,5	45 579,0	50 318,2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	13 760,3	14 802,9	15 426,1	17 062,6	18 242,2
L	Real Estate	15 595,9	16 390,3	17 171,7	17 972,1	18 831,0
M,N	Jasa Perusahaan	11 886,3	12 816,8	13 847,3	14 903,5	16 094,8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3 463,8	3 363,0	3 386,2	3 427,8	3 531,1
P	Jasa Pendidikan	11 521,5	11 980,8	229,3	13 218,3	14 153,1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3 670,3	3 873,1	4 135,1	4 449,2	4 789,4
R,S,T,U	Jasa lainnya	5 945,2	6 446,3	7 000,4	7 562,0	8 169,0
Produk Domestik Regional Bruto		208 109,6	221 960,4	235 186,5	249 263,4	264 251,8

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Jakarta Barat, 2012-2016 (Persen)

	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,11	0,11	0,10	0,09	0,09
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	6,65	6,49	6,43	6,48	6,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,31	0,27	0,27	0,26	0,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
F	Konstruksi	17,35	17,16	16,82	16,70	16,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,71	19,14	19,67	19,03	18,96
H	Transportasi dan Pergudangan	3,95	4,16	4,35	4,61	4,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,78	5,81	5,91	5,89	5,75
J	Informasi dan Komunikasi	14,87	14,73	14,30	14,00	14,13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,96	6,99	6,73	6,95	6,88
L	Real Estate	7,29	7,06	7,00	6,86	6,75
M,N	Jasa Perusahaan	5,83	5,80	5,89	6,06	6,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,94	1,84	1,82	1,83	1,81
P	Jasa Pendidikan	5,59	5,63	5,75	6,12	6,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,80	1,82	1,85	1,88	1,93
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,81	2,96	3,06	3,18	3,25
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 4. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kota Jakarta Barat, 2012-2016 (Persen)

	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	6,27	6,07	6,02	5,96	5,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,24	0,23	0,23	0,22	0,21
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
F	Konstruksi	17,07	17,03	16,74	16,43	15,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,76	18,50	18,28	17,74	17,55
H	Transportasi dan Pergudangan	3,97	4,01	4,12	4,18	4,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,58	5,54	5,53	5,50	5,47
J	Informasi dan Komunikasi	16,31	17,07	17,74	18,29	19,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,61	6,67	6,56	6,85	6,90
L	Real Estate	7,49	7,38	7,30	7,21	7,13
M,N	Jasa Perusahaan	5,71	5,77	5,89	5,98	6,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,66	1,52	1,44	1,38	1,34
P	Jasa Pendidikan	5,54	5,40	5,27	5,30	5,36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,76	1,74	1,76	1,78	1,81
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,86	2,90	2,98	3,03	3,09
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 5. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Jakarta Barat, 2013-2016 (Persen)

Lapangan Usaha		2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,87	4,63	9,41	6,85
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	10,61	12,10	13,05	7,51
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,72	11,60	8,79	1,71
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,25	8,15	7,99	5,88
F	Konstruksi	12,05	11,03	11,26	7,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,86	16,42	8,46	8,99
H	Transportasi dan Pergudangan	19,36	18,49	18,75	12,50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,75	15,21	11,77	6,84
J	Informasi dan Komunikasi	12,14	9,98	9,76	10,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	13,68	9,09	15,74	8,23
L	Real Estate	9,70	12,39	9,76	7,71
M,N	Jasa Perusahaan	12,78	15,04	15,33	11,95
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,10	12,23	12,73	7,88
P	Jasa Pendidikan	14,04	15,66	19,33	15,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,44	15,27	14,00	12,29
R,S,T,U	Jasa lainnya	19,17	17,31	16,29	11,98
Produk Domestik Regional Bruto		13,27	13,26	12,09	9,39

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 6. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kota Jakarta Barat, 2013-2016 (Persen)

Lapangan Usaha		2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,31	0,39	0,23	0,43
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	3,41	5,03	4,98	3,89
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,87	4,33	2,38	-0,27
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,50	4,09	3,74	2,74
F	Konstruksi	6,38	4,19	4,01	1,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,17	4,71	2,87	4,88
H	Transportasi dan Pergudangan	7,85	8,68	7,72	8,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,00	5,72	5,43	5,30
J	Informasi dan Komunikasi	11,59	10,11	9,26	10,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,58	4,21	10,61	6,91
L	Real Estate	5,09	4,77	4,66	4,78
M,N	Jasa Perusahaan	7,83	8,04	7,63	7,99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,91	0,69	1,23	3,02
P	Jasa Pendidikan	3,99	3,52	6,58	7,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,53	6,76	7,60	7,65
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,43	8,60	8,02	8,03
Produk Domestik Regional Bruto		6,66	5,96	5,99	6,01

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Jakarta Barat, 2013-2016

Lapangan Usaha		2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	127,19	133,08	145,60	155,56
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	133,11	149,22	168,70	181,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	150,19	167,61	182,34	185,46
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	119,47	129,21	139,54	147,74
F	Konstruksi	140,48	155,97	173,53	186,21
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	142,13	165,47	179,47	195,60
H	Transportasi dan Pergudangan	151,00	178,92	212,46	239,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	147,77	170,25	190,29	203,31
J	Informasi dan Komunikasi	142,60	156,83	172,14	190,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	143,57	156,63	181,28	196,20
L	Real Estate	131,90	148,24	162,71	175,26
M,N	Jasa Perusahaan	142,16	163,54	188,62	211,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	151,58	170,11	191,77	206,87
P	Jasa Pendidikan	144,29	166,88	199,14	229,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	148,82	171,54	195,55	219,59
R,S,T,U	Jasa lainnya	159,38	186,97	217,43	243,48
Produk Domestik Regional Bruto		142,11	160,96	180,42	197,36

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kota Menurut Lapangan Usaha Kota Jakarta Barat, 2013-2016

Lapangan Usaha		2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	106,69	107,10	107,35	107,81
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	106,83	112,20	117,79	122,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	109,34	114,08	116,80	116,48
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	110,89	115,43	119,74	123,02
F	Konstruksi	119,60	124,60	129,59	131,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	117,88	123,43	126,97	133,17
H	Transportasi dan Pergudangan	125,04	135,89	146,38	158,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	121,03	127,95	134,90	142,05
J	Informasi dan Komunikasi	141,83	156,17	170,63	188,37
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	117,55	122,50	135,50	144,87
L	Real Estate	118,39	124,04	129,82	136,02
M,N	Jasa Perusahaan	121,43	131,20	141,20	152,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	107,26	108,00	109,32	112,62
P	Jasa Pendidikan	118,74	122,92	131,00	140,27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	122,39	130,67	140,59	151,34
R,S,T,U	Jasa lainnya	134,35	145,90	157,61	170,26
Produk Domestik Regional Bruto		121,94	129,21	136,94	145,18

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 9. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (2010=100) Kota Jakarta Barat , 2012-2016

	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	112,03	119,22	124,26	135,63	144,29
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	116,49	124,60	132,99	143,22	148,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	139,55	137,36	146,92	156,12	159,22
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	103,96	107,74	111,94	116,54	120,09
F	Konstruksi	111,52	117,46	125,17	133,90	141,28
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	109,44	120,57	134,05	141,34	146,88
H	Transportasi dan Pergudangan	109,12	120,76	131,66	145,14	150,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	113,77	122,10	133,06	141,06	143,12
J	Informasi dan Komunikasi	100,05	100,55	100,42	100,88	100,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	115,58	122,13	127,86	133,79	135,44
L	Real Estate	106,73	111,41	119,51	125,34	128,85
M,N	Jasa Perusahaan	111,93	117,07	124,65	133,58	138,47
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	128,11	141,32	157,52	175,42	183,69
P	Jasa Pendidikan	110,80	121,52	135,77	152,01	163,80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	112,12	121,59	131,28	139,09	145,09
R,S,T,U	Jasa lainnya	107,94	118,63	128,15	137,96	143,01
	Produk Domestik Regional Bruto	109,74	116,54	124,57	131,75	135,95

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Jakarta Barat, 2013-2016 (Persen)

Lapangan Usaha		2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,41	4,23	9,15	6,39
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	6,97	6,73	7,68	3,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,57	6,97	6,26	1,98
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,63	3,90	4,10	3,05
F	Konstruksi	5,33	6,57	6,97	5,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,17	11,19	5,44	3,92
H	Transportasi dan Pergudangan	10,67	9,03	10,24	3,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,32	8,98	6,01	1,46
J	Informasi dan Komunikasi	0,50	-0,12	0,46	0,02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,67	4,69	4,64	1,23
L	Real Estate	4,39	7,28	4,87	2,80
M,N	Jasa Perusahaan	4,59	6,48	7,16	3,66
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,31	11,46	11,36	4,72
P	Jasa Pendidikan	9,67	11,72	11,97	7,75
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,44	7,97	5,95	4,31
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,91	8,02	7,66	3,66
Produk Domestik Regional Bruto		6,20	6,89	5,76	3,19

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

<http://jakbarkota.bps.go.id>



**SENSUS
EKONOMI**

DATA

Mencerdaskan Bangsa

<http://jakbarkota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**
JL. Raya Kembangan No. 2 Blok B Lantai 7
Telp/Fax : (021) 58356244
Email : bps3174@bps.go.id
Website : jakbarkota.bps.go.id